

BAHAN AJAR (HANJAR) KARAKTER KEBANGSAAN (SEJARAH INDONESIA)

untuk

PENDIDIKAN PEMBENTUKAN BINTARA POLRI

LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI

IDENTITAS BUKU

KARAKTER KEBANGSAAN (SEJARAH INDONESIA)

Penyusun:

LEMDIKLAT POLRI

Editor:

- 1. Kombes Pol Drs. Agus Salim.
- 2. Kombes Pol M. Dani Handani, S.I.K.
- 3. AKBP Henny Wuryandari, S.H.
- 4. AKBP Budi Eka Takariawan, S.H.
- 5. AKBP Henny Wuryandari, S.H.
- 6. AKBP Edy Gestedy A.Md.
- 7. Pembina Dr. BENYAMIN LUFPI, S.S., M.Hum.
- 8. Ipda Alan Martha, S.S., M.M.
- 9. Penata Rindang Galih S., S.E.

Tahun 2021

Bahan Ajar (Hanjar Pendidikan Polri) Sekolah Pendidikan Pembentukan Bintara Polri

Diterbitkan oleh:

Bagian Kurhanjar Pendidikan dan Pembentukan Biro Kurikulum Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri

Hak cipta dilindungi Undang-undang

Dilarang menggandakan sebagian atau seluruh isi Bahan Ajar (Hanjar) Pendidikan Polri ini, tanpa ijin tertulis dari Kalemdiklat Polri.

DAFTAR ISI

Cover			i
Sambutan	Kaler	mdiklat Polri	ii
Keputusan	Kale	mdiklat Polri	iv
Lembar Ide	entita	S	vi
Daftar Isi .		······································	/ii
Pendahulu	an		1
Standar Ko	ompe	tensi	2
MODUL	1	SEJARAH INDONESIA PADA PRA DAN MASA KOLONIALISASI	2
		Pengantar	3
		Kompetensi Dasar	3
		Materi Pelajaran	4
		Metode Pembelajaran	4
		Alat/Media Bahan, dan Sumber Belajar	5
		Kegiatan Pembelajaran	6
		Tagihan/Tugas	6
		Lembar Kegiatan	6
		Bahan Bacaan	7
		POKOK BAHASAN I	
		1. Zaman Prasejarah	7
		2. Sejarah Indonesia Era Kerajaan-kerajaan di Nusantara	9
		POKOK BAHASAN II	
		Sejarah Indonesia Era Kolonial 1	4
		2. Sejarah Indonesia Periode Kolonisasi Portugis di 1	5
		SEJARAH INDONESIA PENDIDIKAN PEMBENTUKAN BINTARA POLRI	vii

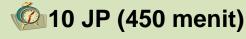
		Nusantara	
		3. Garis waktu kolonialisasi Eropa di Indonesia	16
		Rangkuman	19
		Latihan	19
MODUL	2	SEJARAH INDONESIA PASCA KEMERDEKAAN	20
		Pengantar	20
		Kompetensi Dasar	20
		Materi Pelajaran	20
		Metode Pembelajaran	21
		Alat/Media Bahan, dan Sumber Belajar	21
		Kegiatan Pembelajaran	22
		Tagihan/Tugas	23
		Lembar Kegiatan	23
		Bahan Bacaan	24
		Sejarah Indonesia Era Kemerdekaan	24
		2. Sejarah Indonesia era orde baru	34
		Sejarah Indonesia Era Reformasi	38
		4. Nilai-nilai kejuangan bangsa Indonesia pasca kemerdekaan	41
		Dan aluumaa	
		Rangkuman	44
		Latihan	44
MODUL	3	KEUTUHAN NKRI DALAM KEBHINEKAAN	45
		Pengantar	45
		Kompetensi Dasar	45
		,	

viii

Materi Pelajaran				
Metode Pembelajaran				
Alat/Media Bahan, dan Sumber Belajar				
Kegiatan Pembelajaran				
Tagihan/Tugas				
Lembar Kegiatan				
Bahan Bacaan				
Konsep keutuhan NKRI dalam kebhinekaan	50			
2. Integrasi nasional di Indonesia dalam keutuhan NKRI	53			
3. Otonomi khusus di Indonesia	55			
Ketahanan terhadap propaganda kelompok tertentu terhadap keutuhan NKRI	60			
5. Pembangunan dan konektivitas di Indonesia	64			
6. Kekayaan alam yang tersebar di Indonesia	67			
7. Sinergitas Polri dan TNI sebagai perekat kebhinekaan NKRI	69			
Rangkuman				
I atihan				

HANJAR

SEJARAH INDONESIA





PENDAHULUAN

Pengertian sejarah menurut bahasa terbagi dua yaitu pengertian sejarah dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit, pengertian sejarah adalah kejadian atau peristiwa. Sedangkan pengertian sejarah dalam arti luas adalah suatu peristiwa manusia yang memiliki akar dalam realisasi diri dengan kebebasan dan keputusan daya rohani. Dalam bahasa Indonesia, sejarah memiliki 3 arti yaitu sejarah adalah silsilah atau asal usul, sejarah adalah kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi di masa lampau dan sejarah adalah ilmu pengetahuan dan cerita.

Perlu diketahui nama Indonesia sudah digunakan oleh kaum terpelajar melalui pembentukan Perhimpunan Indonesia (Indonesiche Vereeniging) pada 1922 di negeri Belanda. Jauh sebelum itu wilayah yang kini disebut Indonesia lebih dikenal dengan sebutan Nusantara. Berbagai kerajaan berada dalam wilayah Nusantara ini. Nusantara hampir tidak pernah luput dari penjajahan bangsa asing. Sumber daya alam yang melimpah jadi incaran. Bangsa Portugis di tahun 1509 berhasil menguasai wilayah Malaka dan Ternate. Salah satu perlawanan yang dilakukan adalah dari Fatahillah dari Demak yang berhasil merebut Sunda Kelapa dari Portugis yakni pada tahun 1602.

Sejarah Indonesia meliputi suatu rentang waktu yang sangat panjang yang dimulai sejak zaman prasejarah berdasarkan penemuan "Manusia Jawa" yang berusia 1,7 juta tahun yang lalu. Periode sejarah Indonesia dapat dibagi menjadi lima era: Era Prakolonial, munculnya kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha dan Islam di Jawa, Sumatra, dan Kalimantan yang terutama mengandalkan perdagangan, Era Kolonial, masuknya orang-orang Eropa (terutama Belanda, Portugis, dan Spanyol) yang menginginkan rempah-rempah mengakibatkan penjajahan oleh Belanda selama sekitar 3,5 abad antara awal abad ke-17 hingga pertengahan abad ke-20, Era Kemerdekaan Awal, pasca-Proklamasi Kemerdekaan Indonesia (1945) sampai jatuhnya Soekarno (1966), Era Orde Baru, 32 tahun masa pemerintahan Soeharto (1966–1998), serta Orde Reformasi yang berlangsung sampai sekarang.

Dalam rangka memberikan bekal pengetahuan kepada calon Bintara Polri, maka diberikan materi pelajaran Sejarah Indonesia meliputi pengetahuan sejarah Indonesia dan nilai-nilai kejuangan bangsa Indonesia pada pra-kolonialisasi, sejarah Indonesia dan nilai-nilai kejuangan bangsa Indonesia pada masa kolonialisasi, sejarah Indonesia dan nilai-nilai kejuangan bangsa Indonesia pasca kemerdekaan, keutuhan NKRI dalam kebhinekaan.



STANDAR KOMPETENSI

Memahami Sejarah Indonesia.

MODUL ี 01

SFJARAH INDONESIA PADA PRA DAN MASA KOLONIALISASI



2 JP (90 menit)



PENGANTAR

Dalam modul ini membahas materi yaitu zaman prasejarah, sejarah Indonesia era kerajaan-kerajaan di nusantara, nilai-nilai kejuangan bangsa Indonesia pada pra-kolonialisasi, sejarah Indonesia era kolonial, sejarah Indonesia periode kolonisasi portugis di nusantara, garis waktu kolonialisasi eropa di Indonesia, nilai-nilai kejuangan bangsa Indonesia pada masa kolonialisasi.

Tujuannya adalah agar peserta didik dapat memahami sejarah Indonesia pada pra dan masa kolonialisasi.



KOMPETENSI DASAR

1. Memahami sejarah Indonesia pada pra-kolonialisasi.

Indikator Hasil Belajar:

- a. Menjelaskan zaman prasejarah;
- Menjelaskan sejarah Indonesia era kerajaan-kerajaan di b. nusantara.
- Menjelaskan nilai-nilai kejuangan bangsa Indonesia pada pra-kolonialisasi
- 2. Memahami sejarah Indonesia pada masa kolonialisasi.

Indikator Hasil Belajar:

- Menjelaskan sejarah Indonesia era kolonial; a.
- b. Menjelaskan sejarah Indonesia periode kolonisasi portugis di nusantara:
- C. Menjelaskan garis waktu kolonialisasi eropa di Indonesia;
- Menjelaskan nilai-nilai kejuangan bangsa Indonesia pada d. masa kolonialisasi.



MATERI PELAJARAN

1. Pokok Bahasan:

Sejarah Indonesia pada pra-kolonialisasi.

Subpokok Bahasan:

- a. zaman prasejarah;
- b. sejarah Indonesia era kerajaan-kerajaan di nusantara;
- c. nilai-nilai kejuangan bangsa Indonesia pada prakolonialisasi.

2. Pokok Bahasan:

Sejarah Indonesia pada masa kolonialisasi.

Subpokok Bahasan:

- a. Sejarah Indonesia era kolonial;
- b. Sejarah Indonesia periode kolonisasi portugis di nusantara;
- c. Garis waktu kolonialisasi eropa di Indonesia.
- d. Nilai-nilai kejuangan bangsa Indonesia pada masa kolonialisasi.



METODE PEMBELAJARAN

1. Metode Ceramah

Metode ini digunakan untuk menyampaikan materi tentang Sejarah Indonesia pada pra dan masa kolonialisasi.

2. Metode Tanya jawab.

Metode ini digunakan untuk tanya jawab tentang materi yang disampaikan.

3. Metode game dengan EL (Experiental Learning)

Metode ini digunakan dalam proses belajar dimana peserta didik terlibat aktif di dalam suatu situasi untuk mendapatkan nilai-nilai inspirasi dan terobosan dalam kegiatan yang terstruktur.

4. Metode NLP (Neuro Linguistic Programming)

Metode ini digunakan untuk mengaitkan otak sadar dan otak bawah sadar *(neuro)* dengan memanfaatkan penggunaan bahasa *(linguistic)* yang dilakukan secara berulang-ulang *(programming)*.

5. Metode Brainstorming (curah pendapat).

Metode ini digunakan untuk meng-eksplore pendapat peserta

didik tentang pemahaman awal materi yang akan dibahas.

6. Metode penugasan

Metode ini digunakan pendidik untuk menugaskan peserta didik tentang materi yang telah diberikan.



ALAT/MEDIA, BAHAN DAN SUMBER

1. Alat/media:

- a. Whiteboard;
- b. Laptop:
- c. LCD In focus:
- d. Papan Flipchart;
- e. Lasser point;
- f. Pengeras Suara/sound system.

2. Bahan:

- a. Kertas Flipchart;
- b. Alat Tulis.

3. Sumber:

- a. Hanjar Sejarah Indonesia Diktuk Bintara Polri;
- Indonesia dalam arus sejarah "Jilid 1 masa prasejarah",
 Ichtiar baru Van hoeve, 2012
- c. Indonesia dalam arus sejarah "Jilid 2 kerajaan hindu-budha", Ichtiar baru Van hoeve, 2012
- d. Indonesia dalam arus sejarah "Jilid 3 kedatangan dan peradaban Islam", Ichtiar baru Van hoeve, 2012
- e. Indonesia dalam arus sejarah "Jilid 4 kolonisasi dan perlawanan", Ichtiar baru Van hoeve, 2012
- f. Paparan pendidik.



KEGIATAN PEMBELAJARAN

1. Tahap awal: 10 menit

Pendidik melaksanakan apersepsi:

- a. Membuka kelas dan memberikan salam;
- b. Pendidik memperkenalkan diri dan memberikan salam;
- c. Pendidik menyampaikan tujuan dan materi yang akan disampaikan dalam proses pembelajaran.

2. Tahap inti: 70 menit

- a. Pendidik menyampaikan materi tentang Sejarah Indonesia pada pra dan masa kolonialisasi.
- b. Pendidik memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya/memberikan komentar terkait materi yang disampaikan.
- c. Pendidik mengkondisikan peserta didik merefleksikan untuk memperoleh nilai-nilai kejuangan.

3. Tahap akhir 10 menit.

- a. Pendidik memberikan ulasan dan penguatan materi pembelajaran secara umum.
- b. Pendidik mengecek penguasaan materi dengan bertanya secara lisan dan acak kepada peserta didik.
- c. Pendidik merumuskan *Learning Point*/relevansi yang dikaitkan dengan pelaksanaan tugas dilapangan.
- d. Pendidik menugaskan peserta didik untuk meresume materi yang telah disampaikan.



TAGIHAN / TUGAS

Peserta didik secara individu mengumpulkan hasil penugasan pembuatan resume tentang materi yang telah disampaikan berupa tulisan tangan paling lambat 1 hari setalah penyampaian materi.



LEMBAR KEGIATAN

Pendidik menugaskan kepada peserta didik untuk meresume materi yang telah disampaikan.



BAHAN BACAAN

POKOK BAHASAN I SEJARAH INDONESIA DAN NILAI-NILAI KEJUANGAN BANGSA INDONESIA PADA PRA-KOLONIALISASI

1. Zaman Prasejarah

Nusantara pada periode prasejarah mencakup suatu periode yang sangat panjang, kira-kira sejak 1,7 juta tahun yang lalu, berdasarkan temuan-temuan yang ada. Pengetahuan orang terhadap hal ini didukung oleh temuan-temuan fosil hewan dan manusia (hominid), sisa-sisa peralatan dari batu, bagian tubuh hewan, logam (besi dan perunggu), serta gerabah.



a. Kehidupan Masa Prasejarah

Wilayah Nusantara merupakan kajian yang menarik dari sisi geologi karena sangat aktif. Di bagian timur hingga selatan kepulauan ini terdapat busur pertemuan dua lempeng benua yang besar: Lempeng Eurasia dan Lempeng Indo-Australia. Wilayah barat Nusantara modern muncul kira-kira sekitar kala Pleistosen terhubung dengan Asia Daratan. Sebelumnya diperkirakan sebagian wilayahnya merupakan bagian dari dasar lautan. Daratan ini dinamakan Paparan Sunda ("Sundaland") oleh kalangan geologi. Batas timur daratan lama ini paralel dengan apa yang sekarang dikenal sebagai Garis Wallace. Wilayah timur Nusantara, di sisi lain, secara geografis terhubung dengan Benua Australia dan berumur lebih tua sebagai daratan.

Di akhir Zaman Es terakhir (20.000-10.000 tahun yang lalu) suhu rata-rata bumi meningkat dan permukaan laut meningkat pesat. Sebagian besar Paparan Sunda tertutup lautan dan membentuk rangkaian perairan Selat Malaka, Laut Cina Selatan, Selat Karimata, dan Laut Jawa.

Sejarah geologi Nusantara memengaruhi flora dan fauna, termasuk makhluk mirip manusia yang pernah menghuni wilayah ini. Sebagian daratan Nusantara dulu merupakan dasar laut, seperti wilayah pantai selatan Jawa dan Nusa Tenggara. Aneka fosil hewan laut ditemukan di wilayah ini. Laut dangkal di antara Sumatra, Jawa (termasuk Bali), dan Kalimantan, serta Laut Arafura dan Selat Torres adalah perairan muda yang baru mulai terbentuk kala berakhirnya Zaman Es terakhir (hingga 10.000 tahun sebelum era modern). Flora dan fauna di ketiga pulau tersebut memiliki kesamaan dengan daratan Asia (Indocina, Semenanjung Malaya, dan Filipina). Harimau, gajah, tapir, kerbau, babi, badak, dan berbagai unggas yang hidup di Asia daratan banyak yang memiliki kerabat di ketiga pulau ini.

Makhluk mirip manusia (hominin) yang pertama ditemukan adalah manusia Jawa, yakni ditemukan pada tahun 1891 oleh Eugene Dubois di Trinil, Kabupaten Ngawi. Antara tahun 1931 sampai 1934, G.H.R. von Koenigswald beserta timnya menemukan serangkaian fosil hominin di lembah Bengawan Solo, dekat Desa Ngandong. Para ahli paleontologi sekarang kebanyakan berpendapat bahwa semua fosil temuan dari Jawa adalah Homo erectus dan merupakan bentuk yang primitif. Semula diduga berumur 1.000.000 sampai 500.000 tahun (pengukuran karbon tidak memungkinkan), kini berdasarkan pengukuran radiometri terhadap mineral vulkanik pada lapisan penemuan diduga usianya lebih tua, yaitu 1,7-1,5 juta tahun.

Homo sapiens modern pertama masuk ke Nusantara diduga sekitar 100.000 tahun lalu, melalui India dan Indocina. Fosil Homo sapiens pertama di Jawa ditemukan oleh van Rietschoten (1889), anggota tim Dubois, di Wajak, dekat Campurdarat, Tulungagung, di tepian Sungai Brantas. ditemukan bersamaan dengan tulang tapir, hewan yang pada masa kini tidak hidup di Jawa. Fosil Wajak dianggap bersamaan ras dengan fosil Gua Niah di Sarawak dan Gua Tabon di Pulau Palawan. Fosil Niah diperkirakan berusia 40.000-25.000 tahun (periode Pleistosen) dan menunjukkan fenotipe "Australomelanesoid". Mereka adalah pendukung budaya kapak perimbas (chopper) dan termasuk dalam kultur paleolitikum (Zaman Batu Tua). Usia fosil utuh di Gua Braholo (Gunungkidul, ditemukan tahun 2002) dan Song (Gua) Keplek dan Terus (Pacitan) berusia lebih muda (sekitar 10.000 tahun sebelum era modern atau tahun 0 Masehi). Pendugaan ini berasal dari bentuk perkakas yang ditemukan menyertainya.

Pada Agustus 2017, jurnal sains internasional The Nature melaporkan temuan fosil gigi Homo sapiens di Gua Lida Ajer, Sumatra Barat yang diyakini berusia antara 73.000–63.000 tahun. Temuan itu berdasarkan kajian tim peneliti internasional yang dipimpin oleh ilmuwan dari Macquarie University. Sebelumnya, penyelidikan terhadap gua-gua di Sumatra Barat pernah dilaukan oleh ahli anatomi

berkebangsaan Belanda Eugène Dubois pada 1880-an, tapi hasilnya ia hanya menemukan tulang-belulang hewan dan manusia subresen.

Mata pencaharian dan penghidupan masyarakat prasejarah di Indonesia berkisar antara kehidupan berburu dan meramu masyarakat hutan, hingga kehidupan pertanian yang rumit, dengan kemampuan bercocok tanam padipadian, memelihara hewan ternak, hingga mampu membuat kerajinan tenun dan tembikar. Kondisi pertanian yang ideal memungkinkan upaya bercocok tanam padi lahan basah (sawah) mulai berkembang sekitar abad ke-8 SM. memungkinkan desa dan kota kecil mulai berkembang pada abad pertama Masehi. Kerajaan ini yang lebih mirip kumpulan kampung yang tunduk kepada seorang kepala suku, berkembang dengan kesatuan suku bangsa dan sistem kepercayaan mereka. Iklim tropis Jawa dengan curah hujan yang cukup banyak dan tanah vulkanik memungkinkan pertanian padi sawah berkembang subur. membutuhkan Sistem sawah masyarakat terorganisasi dengan baik dibandingkan dengan sistem padi lahan kering (ladang) yang lebih sederhana sehingga tidak memerlukan sistem sosial yang rumit untuk mendukungnya.

b. Peninggalan masa prasejarah

Peninggalan masa prasejarah Nusantara diketahui dari berbagai temuan-temuan coretan/lukisan di dinding gua atau ceruk di tebing-tebing serta dari penggalian-penggalian pada situs-situs purbakala.

2. Sejarah Indonesia Era Kerajaan-kerajaan di Nusantara

a. Sejarah awal



Para cendekiawan India telah menulis tentang Dwipantara atau kerajaan Hindu Jawa Dwipa di Pulau Jawa dan Sumatra atau Swarna Dwipa sekitar 200 SM. Bukti fisik awal yang menyebutkan mengenai adanya dua kerajaan bercorak Hinduisme pada abad ke-5, yaitu Kerajaan Tarumanagara yang menguasai Jawa Barat dan Kerajaan Kutai di pesisir Sungai Mahakam, Kalimantan. Pada tahun 425 ajaran Buddhisme telah mencapai wilayah tersebut.

Nusantara telah mempunyai warisan peradaban berusia ratusan tahun dengan dua imperium besar, yaitu Sriwijaya di Sumatra pada abad ke-7 hingga ke-14 dan Majapahit di

Jawa pada abad ke-13 sampai ke-16, ditambah dengan puluhan kerajaan kecil yang acap kali menjadi vasal tetangganya yang lebih kuat atau saling terhubung dalam semacam ikatan perkawinan dan perdagangan (seperti di Maluku). Hal tersebut telah terjadi sebelum Eropa Barat mengalami masa Renaisans pada abad ke-16.

b. Kerajaan Hindu-Buddha

Sejarah Nusantara pada Era Kerajaan Hindu Buddha berkembang karena hubungan dagang wilayah Nusantara dengan negara-negara dari luar, seperti India, Tiongkok, dan wilayah Timur Tengah. Agama Hindu masuk ke Indonesia pada periode tarikh Masehi. Agama ini dibawa oleh para musafir dari India yang bernama Maha Resi Agastya. Maha Resi agastya ini di Jawa terkenal dengan nama Batara Guru atau Dwipayana. Ajaran Hindu yang berkembang di beberapa tempat di Nusantara disebut dengan aliran Waiṣṇawa, yaitu suatu ajaran yang memuja Dewa Wiṣṇu sebagai dewa utama. Ajaran ini dianut oleh kelompokkelompok masyarakat di Situs Kota Kapur, Bangka, Situs Cibuaya, Situs Karawang dan Situs Muarakaman, Kutai (pada sekitar abad ke- 5-7 M). Bukti adanya Agama Hindu tampak pada prasasti Tuk Mas yang ditemukan di Desa Lebak, Kecamatan Grabag, Magelang, Jawa Tengah, di lereng Gunung Merbabu yang diperkirakan berasal dari pertengahan abad ke-7 M.

Dalam ajaran Buddha, diketahui dianut oleh kelompok masyarakat Nusantara tepatnya di Situs Batujaya, Situs Bukit Siguntang di Sumatera Selatan, dan Situs Batu Pait di Kalimantan Barat pada sekitar abad ke-6-7 M. Proses penvebaran agama Buddha dilakukan oleh Dharmaduta yang bertugas untuk menyebarkan Dharma atau ajaran Buddha ke seluruh dunia. Penyebaran agama Buddha di Indonesia dilakukan oleh bangsa Indonesia sendiri yang belajar di India dan menjadi Bhiksu kemudian menyebarkan ajarannya di Nusantara. Untuk di daerah pulau Jawa, agama Buddha datang pada Abad ke-5 yang disebarkan oleh pangeran Khasmir (bernama Gunadharma). Pada abad ke-9, penyebaran Agama Buddha dilakukan oleh pendeta-pendeta dari wilayah India yaitu Gaudidwipa (benggala) dan Gujaradesa (Gujarat). Bukti tertua adanya pengaruh Buddha India di Indonesia adalah dengan ditemukannya Arca Buddha dari perunggu di Sempaga, Sulawesi Selatan. Antara abad ke 4 hingga abad ke 16 di berbagai wilayah nusantara berdiri berbagai kerajaan yang bercorak agama Hindu dan Buddha.

Sejak masuknya agama Hindu dan Buddha, masyarakat prasejarah Nusantara yang sebelumnya memiliki kepercayaan animisme dan dinamisme beralih memeluk

agama Hindu dan Buddha.

1) Eksistensi Kerajaan Hindu-Buddha

Agama Buddha pertama kali masuk ke Nusantara sekitar pada abad ke-2 Masehi. Hal tersebut dibuktikan dengan penemuan patung Buddha dari perunggu di daerah Jember dan Sulawesi Selatan. Pengenalan agama Buddha di Nusantara berasal dari laporan seorang pengelana Cina bernama Fa Hsien pada awal abad ke 5 Masehi. Pada abad ke-4 di Jawa Barat terdapat kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha, yaitu kerajaan Tarumanagara. Kemudian dilanjutkan dengan Kerajaan Sunda sampai abad ke-16. Selain Kerajaan Tarumanagara dan Kerajaan Sunda, masih banyak pula kerajaan lain bercorak Hindu-Buddha, seperti Kerajaan Mataram Kuno.

Selanjutnya, muncul dua kerajaan besar, yakni Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit. Pada masa abad ke-7 hingga abad ke-14, kerajaan Buddha Sriwijaya berkembang pesat di Sumatra. Pada sekitar tahun 670 M, Penjelajah Tiongkok yang bernama I-Tsing mengunjungi ibu kota daerah Palembang. Pada puncak kejayaannya, kekuasaan Sriwijaya mencapai daerah Jawa Tengah dan Kamboja. Pada abad ke-14 terdapat satu kerajaan Hindu di Jawa Timur yang bernama Kerajaan Majapahit. Antara tahun 1331-1364,, Patih Majapahit yang bernama Gajah Mada berhasil memperoleh kekuasaan atas wilayah yang kini sebagian besarnya adalah Indonesia beserta hampir seluruh Semenanjung Melayu.

2) Warisan Kebudayaan Hindu Buddha

Sebelum masuknya kebudayaan Hindu-Buddha. masyarakat prasejarah Nusantara telah memiliki kebudayaan yang cukup maju. Selanjutnya, warisan dari Kerajaan Hindu dan Buddha yang pernah ada di Nusantara membentuk berbagai inspirasi hasil karya budaya di Nusantara. Salah satu contohnya ialah karya sastra India yang dibawa ke Indonesia, yakni wiracarita Ramayana, Mahabarata, dan karya sastra lainnya. Adanya kedua kitab itu juga memacu beberapa pujangga Nusantara untuk menghasilkan karyanya sendiri, seperti Empu Dharmaja dari kerajaan Kediri yang menyusun Kitab Smaradhahana, Empu Sedah dan Empu Panuluh dari kerajaan Kediri menelurkan karya Kitab Bharatayuda, Empu Tanakung yang membuat Kirab Lubdaka, Empu Kanwa yang memiliki karya Kitab Arjunawiwaha, Empu Triguna dengan Kitab Kresnayana-nya, Empu Panuluh yang menulis Kitab Gatotkacasraya, Empu Tantular yang membuat Kitab Kitab Sotasoma, dan Empu Prapanca yang masyhur dengan magnum opusnya yang berjudul Kitab Negarakertagama. Dengan demikian, cerita dari karya sastra yang muncul pada masa Hindu Buddha ini menjadi sumber inspirasi bagi pewayangan Indonesia.

Selain karya sastra, sistem politik dan pemerintahan pun diperkenalkan oleh orang-orang India dan membuat masyarakat yang pada awalnya hidup dalam kelompok-kelompok kecil menjadi bersatu dan membentuk sebuah kekuasaan yang lebih besar dengan pemimpin tunggal berupa seorang raja. Karena pengaruh hal ini, beberapa kerajaan Hindu-Buddha seperti Kerajaan Sriwijaya, Majapahit, Tarumanegara, dan Kutai akhirnya dapat muncul di Nusantara.

Tidak hanya karya sastra dan sistem politik saja yang berkembang pada masa Hindu Buddha di Nusantara, banyak pula hasil karya manusia masa lalu yang menandakan sejarah berkembangnya Hindu-Buddha di Nusantara. Beberapa di antaranya ialah adanya alatalat dan benda sarana ritual yang salah satunya berbentuk arca yang memiliki beberapa bentuk yang dapat dikenali dari beberapa tanda khusus (laksana), posisi atau sikap tertentu, dan wahana atau binatang yang dianggap menjadi kendaraan seorang dewa.

3) Runtuhnya Era Kerajaan Hindu-Buddha

Masuknya ajaran Islam pada sekitar abad ke-13 Masehi melahirkan kerajaan-kerajaan bercorak Islam yang ekspansionis, seperti Samudera Pasai di Sumatra dan Demak di Jawa. Munculnya kerajaan-kerajaan tersebut, secara perlahan-lahan mengakhiri kejayaan Sriwijaya dan Majapahit, sekaligus menandai akhir dari era Hindu-Buddha ini.

4) Kerajaan Hindu/Buddha

- a) Kerajaan Hindu/Buddha di Kalimantan Kerajaan Kutai merupakan kerajaan tertua bercorak Hindu di Indonesia. Kerajaan ini terletak di Kalimanan Timur, tepatnya di hulu sungai Mahakam.
- b) Kerajaan Hindu/Buddha di Jawa,
 - (1) Kerajaan Tarumanegara (358-669)
 - (2) Kerajaan Kadiri (1042 1222)
 - (3) Kerajaan Singasari (1222-1292)
 - (4) Kerajaan Majapahit (1292-1527)
- c) Kerajaan Hindu/Buddha di Sumatra, Kerajaan Sriwijaya (600-1300)

c. Kerajaan dan Kesultanan Islam



Kesultanan sebagai sebuah pemerintahan oleh penguasa Muslim hadir di Indonesia sekitar abad ke-12 dan membangung tamadun. Namun, sebenarnya Islam sudah masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Saat itu sudah ada jalur pelayaran yang ramai dan bersifat internasional melalui Selat Malaka yang menghubungkan Dinasti Tang di Tiongkok, Sriwijaya di Asia Tenggara, dan Bani Umayyah di Asia Barat sejak abad ke-7.

Islam terus mengokoh menjadi institusi politik yang mengemban Islam. Misalnya, sebuah kesultanan Islam bernama Kesultanan Peureulak didirikan pada 1 Muharram 225 H atau 12 November 839 M. Contoh lain adalah Kesultanan Ternate. Islam masuk ke kerajaan di Kepulauan Maluku ini tahun 1440. Rajanya seorang Muslim bernama Bayanullah.

Kesultanan Islam kemudian semakin menyebarkan pelbagai ajarannya ke penduduk dan melalui pembauran, menggantikan Hindu dan Buddha sebagai kepercayaan utama pada akhir abad ke-16 di Jawa dan Sumatra. Hanya Bali yang tetap mempertahankan mayoritas Hindu. Di kepulauan-kepulauan di Timur, rohaniawan-rohaniawan Kristen dan Islam diketahui sudah aktif pada abad ke-16 dan 17, dan saat ini ada mayoritas yang besar dari kedua agama di kepulauan-kepulauan tersebut.

Penyebaran Islam dilakukan melalui hubungan perdagangan di luar Nusantara; hal ini, karena para penyebar dakwah atau mubalig merupakan utusan dari negara-negara Muslim yang datang dari luar Indonesia, maka untuk menghidupi diri dan keluarga mereka, para mubalig ini bekerja melalui cara berdagang, para mubalig inipun menyebarkan Islam kepada para pedagang dari penduduk indigenos, hingga para pedagang ini memeluk Islam dan meyebarkan pula ke penduduk lainnya, karena umumnya pedagang dan ahli kerajaan lah yang pertama mengadopsi agama baru tersebut.

POKOK BAHASAN II SEJARAH INDONESIA PADA MASA KOLONIALISASI

1. Sejarah Indonesia Era Kolonial

Afonso (kadang juga ditulis Alfonso) de Albuquerque. Karena tokoh inilah, yang membuat kawasan Nusantara waktu itu dikenal oleh orang Eropa dan dimulainya kolonisasi berabad-abad oleh Portugis bersama bangsa Eropa lain, terutama Britania dan Belanda juga Spanyol dalam waktu yang singkat.



Dari Sungai Tajo yang bermuara ke Samudra Atlantik itulah armada Portugis mengarungi Samudra Atlantik, yang mungkin memakan waktu sebulan hingga tiga bulan, melewati Tanjung Harapan di Afrika, menuju Selat Malaka. Dari sini penjelajahan dilanjutkan ke Kepulauan Maluku untuk mencari rempah-rempah, komoditas yang setara emas kala itu.

"Pada abad ke-16 saat petualangan itu dimulai biasanya para pelaut negeri Katolik itu diberkati oleh pastor dan raja sebelum berlayar melalui Sungai Tagus," kata Teresa. Biara St Jeronimus atau Biara Dos Jeronimos dalam bahasa Portugis itu didirikan oleh Raja Manuel pada tahun 1502 di tempat saat Vasco da Gama memulai petualangan ke timur.



2. Sejarah Indonesia Periode Kolonisasi Portugis di Nusantara

Periode 1511-1526, selama 15 tahun, Nusantara menjadi pelabuhan maritim penting bagi Kerajaan Portugis, yang secara reguler menjadi rute maritim untuk menuju Pulau Sumatra, Jawa, Banda, dan Maluku. Pada tahun 1511 Portugis mengalahkan Kerajaan Malaka.

Pada tahun 1522, Portugis sudah sampai di Pelabuhan Sunda untuk menandatangani perjanjian dagang dengan Raja Sunda. Perjanjian dagang tersebut dilakukan pada tanggal 21 Agustus 1522. Pada hari yang sama dibangun sebuah prasasti yang disebut Prasasti Perjanjian Sunda-Portugal di suatu tempat yang saat ini menjadi sudut Jalan Cengkih dan Jalan Kali Besar Timur I, Jakarta Barat. Dengan perjanjian ini maka Portugis dibolehkan membangun gudang atau benteng di Sunda Kelapa.



Pada 1512, Afonso de Albuquerque mengirim sebuah ekspedisi yang terdiri dari dua kapal dan sebuah karavel di bawah pimpinan Antonio de Abreu untuk mencari kepulauan rempah-rempah.

Kolonialisme dan Imperialisme mulai merebak di Indonesia sekitar abad ke-15, yaitu diawali dengan pendaratan bangsa Portugis di Malaka dan bangsa Belanda yang dipimpin Cornellis de Houtman pada tahun 1596, untuk mencari sumber rempahrempah dan berdagang.

- a. Perlawanan Rakyat terhadap Portugis
 - Kedatangan bangsa Portugis ke Semenanjung Malaka dan ke Kepulauan Maluku merupakan perintah dari negaranya untuk berdagang.
- b. Perlawanan Rakyat Minahasa terhadap Portugis
 Perjuangan perlawanan Rakyat Perserikatan Minahasa

melawan Portugis telah berlangsung dari tahun 1512-1560, dengan gabungan perserikatan suku-suku di Minahasa maka mereka dapat mengusir Portugis. Portugis membangun beberapa Benteng pertahanan di Minahasa di antaranya di Amurang dan Kema.

c. Perlawanan Rakyat Malaka terhadap Portugis

Pada tahun 1511, armada Portugis yang dipimpin oleh menyerang Kerajaan Albuquerque Malaka. Usaha perlawanan kolonial Portugis di Malaka yang terjadi pada tahun 1513 mengalami kegagalan karena kekuatan dan persenjataan Portugis lebih kuat. Pada tahun 1527, armada Demak di bawah pimpinan Fatahillah/Falatehan dapat menguasai Banten, Sunda Kelapa, dan Cirebon. Armada Portugis dapat dihancurkan oleh Fatahillah/Falatehan dan ia kemudian mengganti nama Sunda Kelapa meniadi Jayakarta yang artinya kemenangan besar, yang kemudian menjadi Jakarta.

d. Perlawanan rakyat Aceh terhadap Portugis

Mulai tahun 1554 hingga tahun 1555, upaya Portugis tersebut gagal karena Portugis mendapat perlawanan keras dari rakyat Aceh. Pada saat Sultan Iskandar Muda berkuasa, Kerajaan Aceh pernah menyerang Portugis di Malaka pada tahun 1615 dan 1629.

e. Perlawanan Rakyat Maluku terhadap Portugis

Bangsa Portugis pertama kali mendarat di Maluku pada tahun 1511. Kedatangan Portugis berikutnya pada tahun 1513. Akan tetapi, Ternate merasa dirugikan oleh Portugis karena keserakahannya dalam memperoleh keuntungan melalui usaha monopoli perdagangan rempah-rempah.

Pada tahun 1533, Sultan Ternate menyerukan kepada seluruh rakyat Maluku untuk mengusir Portugis di Maluku. Pada tahun 1570, rakyat Ternate yang dipimpin oleh Sultan Hairun dapat kembali melakukan perlawanan terhadap bangsa Portugis, namun dapat diperdaya oleh Portugis hingga akhirnya tewas terbunuh di dalam Benteng Duurstede. Selanjutnya dipimpin oleh Sultan Baabullah pada tahun 1574. Portugis diusir yang kemudian bermukim di Pulau Timor.

3. Garis waktu kolonialisasi Eropa di Indonesia

a. Kolonialisasi Spanyol

Setelah kedatangan Portugis dan sebelum kedatangan Belanda, Indonesia juga pernah didatangi bangsa Spanyol. Spanyol tak sempat menguasai kerajaan-kerajaan Nusantara. Di Indonesia, Spanyol hanya sempat bersaing dengan Portugis di Maluku. Bahkan, Spanyol sebenarnya telah berlayar lebih dulu dibanding Portugis. Namun pelayar

Spanyol yang termahsyur, Christopher Columbus, tidak berhasil menemukan 'Kepulauan rempah-rempah'. Columbus hanya sampai ke benua Amerika. Meski sebuah keberhasilan besar, Spanyol belum berhasil menemukan kepulauan rempah-rempah yang dimaksud.

b. Kolonialisasi Portugis

Bangsa Portugis merupakan bangsa Eropa pertama yang mencapai Kepulauan Nusantara. Pencarian mereka untuk mendominasi sumber perdagangan rempah-rempah yang menguntungkan pada awal abad ke-16 dan usaha penyebaran Katolik Roma mereka yang berbarengan menyaksikan pendirian pos dan benteng perdagangan, serta unsur budaya Portugis yang kuat yang masih tetap penting di Indonesia.

c. Kolonisasi VOC

Mulai Tahun 1602 Kongsi dagang VOC yang didirikan di Republik Persekutuan Tujuh Provinsi bersaing dengan kerajaan Portugal dan Kerajaan Spanyol dalam dominasi perdagangan rempah di Hindia Timur (Nusantara), secara perlahan-lahan menjadi penguasa wilayah yang kini adalah Indonesia, dengan memanfaatkan Perselisihan dan perpecahan di antara kerajaan-kerajaan kecil yang telah menggantikan Majapahit. VOC berhasil mengeliminasi Kongsi dagang EIC yang didirikan oleh kerajaan Inggris yang bertahan di bengkulu hingga 1824, satu-satunya koloni Portugal yang masih bertahan hingga abad 20 adalah Timor Portugis, yang tetap dikuasai Portugal hingga Tahun 1975 ketika berintegrasi menjadi provinsi Indonesia bernama Timor Timur.



Pada abad ke-17 dan 18 Hindia Belanda tidak dikuasai secara langsung oleh pemerintah Belanda namun oleh perusahaan dagang bernama Perusahaan Hindia Timur Belanda (bahasa Belanda: Verenigde Oostindische Compagnie atau VOC). VOC telah diberikan hak monopoli terhadap perdagangan dan aktivitas kolonial di wilayah tersebut oleh Parlemen Belanda pada tahun 1602. Markasnya berada di Batavia, yang kini bernama Jakarta.

Tujuan utama VOC adalah mempertahankan monopolinya terhadap perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Hal ini

dilakukan melalui penggunaan dan ancaman kekerasan terhadap penduduk di kepulauan-kepulauan penghasil rempah-rempah, dan terhadap orang-orang non-Belanda yang mencoba berdagang dengan para penduduk tersebut. Contohnya, ketika penduduk Kepulauan Banda terus menjual biji pala kepada pedagang Inggris, pasukan Belanda membunuh atau mendeportasi hampir seluruh populasi dan kemudian mempopulasikan pulau-pulau tersebut dengan pembantu-pembantu atau budak-budak yang bekerja di perkebunan pala.

VOC menjadi terlibat dalam politik internal Jawa pada masa ini, dan bertempur dalam beberapa peperangan yang melibatkan pemimpin Mataram dan Banten.

- d. Kolonisasi Pemerintah Belanda
 - 1) Era Napoleon (Tahun 1800-1811)



- 2) Interregnum Britania (Tahun 1811-1816)
- 3) Pemerintahan Kerajaan Belanda (sejak Tahun 1816)
- 4) Gerakan nasionalisme (Tahun 1905)
- 5) Perang Dunia II. (Tahun 1940)



6) Pendudukan Jepang (Tahun 1942).





RANGKUMAN

- 1. Nusantara pada periode prasejarah mencakup suatu periode yang sangat panjang, kira-kira sejak 1,7 juta tahun yang lalu, berdasarkan temuan-temuan yang ada. Pengetahuan orang terhadap hal ini didukung oleh temuan-temuan fosil hewan dan manusia (hominid), sisa-sisa peralatan dari batu, bagian tubuh hewan, logam (besi dan perunggu), serta gerabah.
- 2. Sejarah Nusantara pada Era Kerajaan Hindu Buddha berkembang karena hubungan dagang wilayah Nusantara dengan negara-negara dari luar, seperti India, Tiongkok, dan wilayah Timur Tengah. Agama Hindu masuk ke Indonesia pada periode tarikh Masehi. Agama ini dibawa oleh para musafir dari India yang bernama Maha Resi Agastya. Maha Resi agastya ini di Jawa terkenal dengan nama Batara Guru atau Dwipayana.
- 3. Afonso (kadang juga ditulis Alfonso) de Albuquerque. Karena tokoh inilah, yang membuat kawasan Nusantara waktu itu dikenal oleh orang Eropa dan dimulainya kolonisasi berabad-abad oleh Portugis bersama bangsa Eropa lain, terutama Britania dan Belanda juga Spanyol dalam waktu yang singkat.
- 4. Periode 1511-1526, selama 15 tahun, Nusantara menjadi pelabuhan maritim penting bagi Kerajaan Portugis, yang secara reguler menjadi rute maritim untuk menuju Pulau Sumatra, Jawa, Banda, dan Maluku. Pada tahun 1511 Portugis mengalahkan Kerajaan Malaka.
- 5. Kolonialisme dan Imperialisme mulai merebak di Indonesia sekitar abad ke-15, yaitu diawali dengan pendaratan bangsa Portugis di Malaka dan bangsa Belanda yang dipimpin Cornellis de Houtman pada tahun 1596, untuk mencari sumber rempahrempah dan berdagang.



LATIHAN

- 1. Jelaskan zaman prasejarah!
- 2. Jelaskan sejarah Indonesia era kerajaan-kerajaan di nusantara!
- 3. Jelaskan nilai-nilai kejuangan bangsa Indonesia pada prakolonialisasi!
- 4. Jelaskan sejarah Indonesia era kolonial!
- 5. Jelaskan sejarah Indonesia periode kolonisasi portugis di nusantara!
- 6. Jelaskan garis waktu kolonialisasi eropa di Indonesia!
- 7. Jelaskan nilai-nilai kejuangan bangsa Indonesia pada masa kolonialisasi!

MODUL 02

SEJARAH INDONESIA PASCA KEMERDEKAAN



2 JP (90 menit)



PENGANTAR

Dalam modul ini membahas materi yaitu sejarah Indonesia era kemerdekaan, sejarah Indonesia era orde baru, sejarah Indonesia era reformasi, nilai-nilai kejuangan bangsa Indonesia pasca kemerdekaan.

Tujuannya adalah agar peserta didik dapat memahami sejarah Indonesia pasca kemerdekaan



KOMPETENSI DASAR

Memahami sejarah Indonesia pasca kemerdekaan.

Indikator Hasil Belajar:

- 1. Menjelaskan sejarah Indonesia era kemerdekaan;
- 2. Menjelaskan sejarah Indonesia era orde baru;
- 3. Menjelaskan sejarah Indonesia era reformasi;
- 4. Menjelaskan nilai-nilai kejuangan bangsa Indonesia pasca kemerdekaan.



MATERI PELAJARAN

Pokok Bahasan:

Sejarah Indonesia pasca kemerdekaan.

Subpokok Bahasan:

- 1. Sejarah Indonesia era kemerdekaan:
- 2. Sejarah Indonesia era orde baru;
- 3. Sejarah Indonesia era reformasi;
- 4. Nilai-nilai kejuangan bangsa Indonesia pasca kemerdekaan.



METODE PEMBELAJARAN

1. Metode Ceramah

Metode ini digunakan untuk menyampaikan materi tentang Sejarah Indonesia pasca kemerdekaan.

2. Metode Tanya jawab.

Metode ini digunakan untuk tanya jawab tentang materi yang disampaikan.

3. Metode Simulasi EL (Experiental Learning)

Metode ini digunakan dalam proses belajar dimana peserta didik terlibat aktif di dalam suatu situasi untuk mendapatkan nilai-nilai inspirasi dan terobosan dalam kegiatan yang terstruktur.

4. Metode NLP (Neuro Linguistic Programming)

Metode ini digunakan untuk mengaitkan otak sadar dan otak bawah sadar (neuro) dengan memanfaatkan penggunaan bahasa (linguistic) yang dilakukan secara berulang-ulang (programming).

5. Metode Brainstorming (curah pendapat).

Metode ini digunakan untuk meng-eksplore pendapat peserta didik tentang pemahaman awal materi yang akan dibahas.

6. Metode penugasan

Metode ini digunakan pendidik untuk menugaskan peserta didik tentang materi yang telah diberikan.



ALAT/MEDIA, BAHAN DAN SUMBER

1. Alat/media:

- a. Whiteboard:
- b. Laptop;
- c. LCD in focus:
- d. Papan Flipchart;
- e. Lasser point;
- f. Pengeras Suara/sound system.

2. Bahan:

- a. Kertas Flipchart;
- b. Alat Tulis.

3. Sumber:

a. Hanjar Sejarah Indonesia Diktuk Bintara Polri;

- b. Indonesia dalam arus sejarah "Jilid 5 masa pergerakan kebangsaan", Ichtiar baru Van hoeve, 2012
- c. Indonesia dalam arus sejarah "Jilid 6 perang dan revolusi", Ichtiar baru Van hoeve, 2012
- d. Indonesia dalam arus sejarah "Jilid 7 pasca revolusi", Ichtiar baru Van hoeve, 2012
- e. Indonesia dalam arus sejarah "Jilid 8 orde baru dan revormasi", Ichtiar baru Van hoeve, 2012
- f. Paparan pendidik.



KEGIATAN PEMBELAJARAN

1. Tahap awal : 10 menit

Pendidik melaksanakan apersepsi:

- a. Pendidik melakukan overview materi sebelumnya;
- b. Pendidik menyampaikan tujuan dan materi yang akan disampaikan dalam pembelajaran.

2. Tahap inti : 70 menit

- Pendidik menyampaikan materi tentang Sejarah Indonesia pasca kemerdekaan.
- b. Pendidik memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya/memberikan komentar terkait materi yang disampaikan.
- c. Pendidik mengkondisikan peserta didik merefleksikan untuk memperoleh nilai-nilai kejuangan.

3. Tahap akhir 10 menit.

- Pendidik memberikan ulasan dan penguatan materi pembelajaran secara umum.
- b. Pendidik mengecek penguasaan materi dengan bertanya secara lisan dan acak kepada peserta didik.
- c. Pendidik merumuskan *Learning Point*/relevansi yang dikaitkan dengan pelaksanaan tugas dilapangan.
- d. Pendidik menugaskan peserta didik untuk meresume materi yang telah disampaikan.



TAGIHAN / TUGAS

Peserta didik secara kelompok mengumpulkan materi paparan hasil diskusi kepada Pendidik.



LEMBAR KEGIATAN

Pendidik menugaskan kepada peserta didik untuk membuat paparan sesuai penugasan yang diberikan Pendidik.



BAHAN BACAAN

SEJARAH INDONESIA PASCA KEMERDEKAAN

1. Sejarah Indonesia Era Kemerdekaan

a. Proklamasi Kemerdekaan (Tahun 1945)



Mendengar kabar bahwa Jepang tidak lagi mempunyai kekuatan untuk membuat keputusan seperti itu pada 16 Agustus, Soekarno membacakan "Proklamasi" pada hari berikutnya. Kabar mengenai proklamasi menyebar melalui radio dan selebaran sementara pasukan militer Indonesia pada masa perang, Pasukan Pembela Tanah Air (PETA), para pemuda, dan lainnya langsung berangkat mempertahankan kediaman Soekarno.

Masa pendudukan Jepang di Nusantara atau Indonesia yang saat itu masih menjadi koloni Belanda dimulai pada tahun 1942 dan berakhir pada tanggal 17 Agustus 1945 seiring dengan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia oleh Ir. Soekarno dan M. Hatta.

Pada 18 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) melantik Soekarno sebagai Presiden dan Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden dengan menggunakan konstitusi yang dirancang beberapa hari sebelumnya. Kemudian dibentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) sebagai parlemen sementara hingga pemilu dapat dilaksanakan.

b. Perang kemerdekaan (Tahun 1945)



Pada 6 Agustus 1945, 2 bom atom dijatuhkan ke dua kota di Jepang, Hiroshima dan Nagasaki oleh Amerika Serikat. Ini menyebabkan Jepang menyerah kepada Amerika Serikat dan sekutunya. Momen ini pun dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. 7 Agustus -BPUPKI berganti nama menjadi PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Pada 9 Agustus 1945 Soekarno, Hatta dan Radjiman Wedyodiningrat diterbangkan ke Vietnam untuk bertemu Marsekal Terauchi. Mereka dikabarkan bahwa pasukan Jepang sedang menuju kehancuran tetapi Jepang menginginkan kemerdekaan Indonesia pada 24 Agustus.

Saat Soekarno, Hatta dan Radjiman kembali ke tanah air pada tanggal 14 Agustus 1945, Syahrir mendesak agar Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan. Namun Soekarno belum yakin bahwa Jepang memang telah menyerah, dan proklamasi kemerdekaan RI saat itu dapat menimbulkan pertumpahan darah yang besar, dan dapat berakibat sangat fatal jika para pejuang Indonesia belum siap. 15 Agustus - Jepang menyerah kepada Sekutu. Tentara dan Angkatan Laut Jepang masih berkuasa di Indonesia karena Jepang telah berjanji akan mengembalikan kekuasaan di Indonesia ke tangan Belanda.

Para pemuda pejuang, termasuk Chaerul Saleh, yang tergabung dalam gerakan bawah tanah kehilangan kesabaran, dan pada dini hari tanggal 16 Agustus 1945 mereka menculik Soekarno dan Hatta, dan membawanya ke Rengasdengklok, yang kemudian terkenal sebagai peristiwa Rengasdengklok. Di sini, mereka kembali meyakinkan Soekarno bahwa Jepang telah menyerah dan para pejuang telah siap untuk melawan Jepang, apa pun risikonya.

Malam harinya, Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta, bertemu dengan Jenderal Moichiro Yamamoto dan bermalam di kediaman Laksamana Muda Maeda Tadashi. Dari komunikasi antara Hatta dan tangan kanan komandan Jepang di Jawa ini, Soekarno dan Hatta menjadi yakin bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu, dan tidak memiliki wewenang lagi untuk memberikan kemerdekaan.

Mengetahui bahwa proklamasi tanpa pertumbahan darah telah tidak mungkin lagi, Soekarno, Hatta dan anggota PPKI lainnya malam itu juga rapat dan menyiapkan teks Proklamasi yang kemudian dibacakan pada pagi hari tanggal 17 Agustus 1945.

Tentara Pembela Tanah Air, kelompok muda radikal, dan rakyat Jakarta mengorganisasi pertahanan di kediaman Soekarno. Selebaran kemudian dibagi-bagikan berisi tentang pengumuman proklamasi kemerdekaan. Adam Malik juga mengirim pesan singkat pengumuman Proklamasi ke luar negeri.

c. Pemerintahan Transisi (Tahun 1965)

Sejarah Indonesia (Tahun 1965-1966) adalah masa Transisi ke Orde Baru, masa di mana pergolakan politik terjadi di Indonesia di pertengahan 1960-an, digulingkannya presiden pertama Indonesia, Soekarno setelah 21 tahun menjabat. Periode ini adalah salah satu periode paling penuh gejolak dalam sejarah modern Indonesia. Periode ini juga menandakan dimulainya 32 tahun masa kepemimpinan Soeharto.

Dari akhir 1950-an, konflik politik dan kemerosotan ekonomi terus bertambah di Indonesia. Pada pertengahan 1960-an, pemerintahan Soekarno yang kekurangan uang harus membuang subsidi sektor-sektor publik yang penting, perkiraan inflasi tahunan terjadi pada 500-1.000%, pendapatan ekspor menyusut, infrastruktur hancur, dan pabrik-pabrik beroperasi pada kapasitas minimal dengan investasi terabaikan. Sementara kemiskinan parah dan kelaparan menjadi meluas, Soekarno memimpin Indonesia dalam konfrontasi militer dengan Malaysia sambil meningkatkan retorika revolusi dan anti-Barat.

d. Perpecahan Militer

Kebijakan-kebijakan Soekarno tersebut hanya memberikan Soekarno beberapa teman dan lebih banyak musuh di negara-negara Barat. Musuh ini terutama mencakup Amerika Serikat dan Inggris Raya, yang mana para investornya semakin marah dengan kebijakan Soekarno menasionalisasi aset tambang mineral, pertanian, dan energi. Karena membutuhkan Indonesia sebagai sekutu dalam Perang Dingin melawan Uni Soviet, Amerika Serikat menciptakan sejumlah hubungan dengan para perwira militer TNI melalui pertukaran dan transaksi senjata. Hal ini memupuk perpecahan di jajaran TNI, dengan Amerika Serikat dan sekutunya mendukung sebuah faksi sayap kanan TNI yang berseberangan terhadap faksi sayap kiri TNI yang mendukung Partai Komunis Indonesia.

Pada tahun 1963, kebijakan Konfrontasi terhadap Federasi

Malaysia yang baru terbentuk diumumkan oleh masa pemerintahan Soekarno. Hal ini semakin memperburuk perpecahan antara faksi TNI sayap kiri dan sayap kanan, dengan faksi sayap kiri TNI dan Partai Komunis mengambil bagian dalam serangan gerilya di perbatasan antara Kalimantan dengan Malaysia, sementara faksi sayap kanan TNI sebagian besar absen dari konflik (tidak jelas apakah karena pilihan atau perintah Soekarno).

Politik konfrontasi ini selanjutnya semakin mendorong Blok Barat untuk mencari cara untuk menggulingkan Soekarno, yang dipandang sebagai ancaman terhadap stabilitas regional Asia Tenggara (begitu pula Vietnam Utara dalam pandangan Teori Domino Blok Barat). Mendalamnya konflik bersenjata ini mendekati perang terbuka antara Indonesia Malavsia tahun 1965. dan pada meningkatkan ketidakpuasan dunia terhadap rezim Soekarno memperkuat peluang kekuasaan para jenderal TNI faksi sayap kanan yang pasukannya masih dekat dengan pusat kekuasaan di Jakarta.

e. Demokrasi Parlementer (Tahun 1950)

Era Demokrasi Liberal (Tahun 1950–1959) yang dikenal pula dengan Era Demokrasi Parlementer adalah era ketika Presiden Soekarno memerintah menggunakan konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950. Periode ini berlangsung dari 17 Agustus 1950 (sejak pembubaran Republik Indonesia Serikat) sampai 5 Juli 1959 (keluarnya Dekret Presiden). Pada masa ini terjadi sejumlah peristiwa penting, seperti Konferensi Asia–Afrika di Bandung, pemilihan umum pertama di Indonesia dan pemilihan Konstituante, serta periode ketidakstabilan politik yang berkepanjangan, dengan tidak ada kabinet yang bertahan selama dua tahun.

Pada masa Soekarno, sistem pemerintahan di Indonesia mengalami beberapa peralihan. Indonesia pernah menerapkan sistem pemerintahan presidensial, parlementer (demokrasi liberal), hingga demokrasi terpimpin. Pada masa pemerintahan Soekarno juga terjadi penyimpangan UUD 1945, di antaranya perubahan fungsi Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), dari pembantu presiden menjadi badan yang diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan GBHN yang merupakan wewenang MPR.

Salah satu hasil dari Konferensi Meja Bundar tahun 1949 adalah terbentuknya Negara Republik Indonesia Serikat (RIS). Pembentukan negara federal yang diprakasai oleh Belanda untuk melemahkan integrasi Indonesia sebagai negara kesatuan ternyata tidak didukung masyarakat Indonesia. Banyak negara bagian yang menyatakan ingin kembali ke negara kesatuan dan pada 15 Agustus 1950,

Perdana Menteri Kabinet RIS Mohammad Hatta menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno.

Pada 17 Agustus 1950, Indonesia kembali menjadi negara Pemerintahan Republik Indonesia kesatuan. masih melanjutkan model demokrasi parlementer yang liberal. Kabinet dipimpin oleh seorang perdana menteri sebagai kepala pemerintahan dan bertanggung jawab kepada parlemen. Presiden hanya berkedudukan sebagai kepala negara. Sementara itu, Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia (UUDS) 1950 digunakan sebagai konstitusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Sementara Republik Indonesia, dalam Sidang Pertama Babak ke-3 Rapat ke-71 DPR RIS tanggal 14 Agustus 1950 di Jakarta. Konstitusi ini dinamakan "sementara", karena bersifat sementara. menunggu terpilihnya hanya Konstituante hasil pemilihan umum yang akan menyusun konstitusi baru.

UUDS 1950 sangat berbeda dengan UUD 1945 dalam banyak hal; ia mengamanatkan sistem pemerintahan parlementer dan menetapkan secara panjang lebar jaminan konstitusional untuk hak asasi manusia, yang sangat mengacu pada Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia oleh PBB tahun 1948.

Tidak lama setelah itu, Indonesia mengadopsi undangundang baru yang terdiri dari sistem parlemen di mana dewan eksekutifnya dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada parlemen atau MPR. MPR terbagi kepada partaipartai politik sebelum dan sesudah pemilu pertama pada tahun 1955, sehingga koalisi pemerintah yang stabil susah dicapai. Peran Islam di Indonesia menjadi hal yang rumit. Soekarno lebih memilih negara sekuler yang berdasarkan Pancasila sementara beberapa kelompok Muslim lebih menginginkan negara Islam atau undang-undang yang berisi sebuah bagian yang menyaratkan umat Islam takluk kepada hukum Islam.Demokrasi Parlementer, adalah suatu demokrasi yang menempatkan kedudukan badan legislatif lebih tinggi daripada badan eksekutif. Kepala pemerintahan dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Perdana menteri menteri-menteri dalam kabinet diangkat diberhentikan oleh parlemen. Dalam demokrasi parlementer Presiden menjabat sebagai kepala negara.

Demokrasi Parlementer dengan banyak partai justru menimbulkan ketidakstabilan politik. Pada masa ini terjadi banyak pergantian kabinet. Tercatat ada tujuh kabinet pada masa ini. Kabinet jatuh bangun karena munculnya mosi tidak percaya dari partai lawan. Di samping itu, terjadi

perdebatan dalam Konstituante yang sering menimbulkan konflik berkepanjangan.

- 1) Kabinet Natsir
- 2) Kabinet Sukiman-Suwirjo
- 3) Kabinet wilopo
- 4) Kabinet Ali Sastroamidjojo I
- 5) Kabinet Burhanuddin Harahap
- 6) Kabinet Ali Sastroamidjojo II
- 7) Kabinet Djuanda

f. Demokrasi Terpimpin

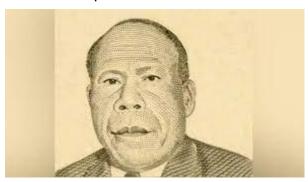
Pemilihan Umum Tahun 1955 berhasil memilih Konstituante secara demokratis, namun Konstituante gagal membentuk konstitusi baru sampai berlarut-larut. Presiden Soekarno lalu menyampaikan konsep Demokrasi Terpimpin pada DPR hasil pemilu yang berisi ide untuk kembali pada UUD 1945. Pada tanggal 5 Juli 1959, Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang antara lain berisi pembubaran Konstituante serta penggantian konstitusi dari UUDS 1950 menjadi UUD 1945 kembali. Peristiwa ini menandai berakhirnya Demokrasi Parlementer dan mulainya Era Demokrasi Terpimpin. Pemerintah kemudian membentuk lembaga-lembaga MPRS dalam demokrasi terpimpin yang menerapkan sistem politik keseimbangan.

Pada masa ini Soekarno merencanakan konsep pentingnya persatuan antara kaum nasionalis, agama, dan komunis. Pemberontakan yang gagal di Sumatra, Sulawesi, Jawa Barat dan pulau-pulau lainnya yang dimulai sejak 1958, ditambah kegagalan MPR untuk mengembangkan konstitusi baru. Akibatnya pada 1959 ketika Presiden Soekarno secara unilateral membangkitkan kembali konstitusi 1945 yang bersifat sementara, yang memberikan kekuatan presidensil yang besar, dia tidak menemui banyak hambatan. Dari 1959 hingga 1965, Presiden Soekarno berkuasa dalam rezim yang otoriter di bawah label "Demokrasi Terpimpin". Dia juga menggeser kebijakan luar negeri Indonesia menuju non-blok, kebijakan yang didukung para pemimpin penting negara-negara bekas jajahan yang menolak aliansi resmi dengan Blok Barat maupun Blok Uni Soviet. Para pemimpin tersebut berkumpul di Bandung, Jawa Barat pada tahun 1955 dalam KTT Asia-Afrika untuk mendirikan fondasi yang kelak menjadi Gerakan Non-Blok. Pada akhir 1950-an dan awal 1960-an, Soekarno bergerak lebih dekat kepada negara-negara komunis Asia dan kepada Partai Komunis Indonesia (PKI) di dalam negeri.

g. Nasib Irian Barat

Pada saat perjuangan kemerdekaan, pemerintah Belanda mempertahankan kekuasaan terhadap belahan barat pulau Nugini (Papua) . Pada perundingan Meja Bundar di Den Haag pada 1949, dicapai kesepakatan bahwa status Koloni belanda di belahan barat nugini (Papua) akan dibicarakan setahun setelah pemindahan kedaulatan dari Kolonial Belanda ke Republik Indonesia Serikat telah dilakukan (2 November 1949). Namun setelah perundingan Meja Bundar mencapai kesepakatan, Kolonial Belanda di Nugini mengizinkan langkah-langkah menuju pemerintahan-sendiri dan pendeklarasian kemerdekaan penduduk Nugini Belanda pada 1 Desember 1961. Pahlawan dalam memperjuangkan irian barat:

1) Frans Kaisiepo



Pada 1945, Frans bertemu Sugoro Atmoprasodjo di Sekolah Kursus Pegawai. Mereka dengan cepat menemukan titik temu karena dukungan bersama mereka untuk kemerdekaan Indonesia. Kaisiepo sering mengadakan pertemuan rahasia untuk membahas aneksasi Nugini Belanda oleh Republik Indonesia.

Pada 31 Agustus 1945, ketika Papua masih diduduki Belanda, Frans termasuk salah satu orang menegakkan eksistensi Republik Indonesia dan orang pertama yang mengibarkan Bendera Merah Putih dan menyayikan lagu Indonesia Raya di Papua.

Pada Juli 1946, Frans menjadi utusan Nugini Belanda dan satu-satunya orang asli Papua pada Konferensi Malino di Sulawesi Selatan. Sebagai Juru Bicara, dia menyarankan wilayah itu disebut "Irian", menjelaskan kata itu berarti "tempat yang panas" dalam bahasa aslinya, Biak. Pada bulan yang sama, Partai Indonesia Merdeka didirikan oleh Frans di Biak, dengan Lukas Rumkoren sebagai pemimpin terpilih partai tersebut.

Pada Agustus 1947, Silas Papare memimpin pengibaran bendera merah putih Indonesia untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Tindakan ini mengakibatkan penangkapan semua peserta oleh polisi Belanda. Mereka dikurung selama lebih dari tiga bulan. Selama itu Frans dan Johans Ariks mengambil peran Papare. Johans kemudian mengetahui rencana untuk mengintegrasikan Irian Barat sebagai wilayah Indonesia, alih-alih mengembangkan otonominya.

Frans terlibat dalam pemberontakan di Biak pada Maret 1948, memprotes pemerintahan Belanda. Pada tahun 1949, ia menolak penunjukan sebagai pemimpin delegasi Nugini Belanda dalam Konferensi Meja Bundar Belanda-Indonesia, karena ia merasa Belanda berusaha mendikte dia. Karena perlawanannya, dia dipenjarakan dari tahun 1954 hingga 1961.

2) Silas Papare



Silas Papare (lahir di Serui, Papua, 18 Desember 1918, meninggal di Serui, Papua, 7 Maret 1979 pada tahun adalah seorang pejuang penyatuan Irian Jaya (Papua) ke dalam wilayah Indonesia. Ia adalah seorang pahlawan nasional Indonesia. Namanya diabadikan menjadi salah satu Kapal Perang Korvet kelas Parchim TNI AL KRI Silas Papare dengan nomor lambung 386, dan juga namanya diabadikan menjadi nama Pangkalan Udara TNI Angkatan Udara di Sentani, Jayapura menjadi Lanud Silas Papare Jayapura. Selain itu didirikan Monumen Silas Papare di dekat pantai dan pelabuhan Sementara di Jayapura, Serui. diabadikan sebagai nama Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Politik (STISIPOL) Silas Papare, yang berada di Jalan Diponegoro dan Pangkalan TNI AU Silas Papare, Sedangkan di kota Nabire, nama Silas Papare dikenang dalam wujud nama jalan

la menyelesaikan pendidikan di Sekolah Juru Rawat pada tahun 1935 dan bekerja di rumah sakit di Serui selama 3 tahun. Setelah itu Silas bekerja pada perusahaan minyak di Sorong hingga awal tahun 1942 ketika Jepang masuk. Pada tahun 1944, ia direkrut sebagai mata-mata Amerika Serikat untuk membantu perlawanan terhadap tentara Jepang di Papua. Ketika

Belanda berusaha kembali menduduki Papua setelah Perang Dunia II berakhir, Silas berserta beberapa temannya berusaha memengaruhi Batalyon Papua untuk memberontak pada Desember 1945. Usaha tersebut gagal dan Silas dihukum oleh Belanda dan dipenjarakan di Jayapura.

Semasa menjalani masa tahanan di Serui, Silas berkenalan dengan Dr. Sam Ratulangi, Gubernur Sulawesi yang diasingkan oleh Belanda ke tempat tersebut. Perkenalannya tersebut semakin menambah keyakinan ia bahwa Papua harus bebas dan bergabung dengan Republik Indonesia. Akhirnya, ia mendirikan Partai Kemerdekaan Indonesia Irian (PKII) pada November 1946. Pada tahun 1949, jumlah anggota PKII terus meningkat hingga mencapai 4.000 orang, walau PKII dinyatakan ilegal oleh Belanda dan bergerak secara diam-diam. Silas kembali ditangkap oleh Belanda karena mendirikan PKII dan dipenjarakan di Biak. Namun, Silas Papare berhasil melarikan diri dan pergi menuju Yogyakarta.

Pada bulan Oktober 1949 di Yogyakarta, ia mendirikan Badan Perjuangan Irian di Yogyakarta dalam rangka membantu pemerintah Republik Indonesia untuk memasukkan wilayah Irian Barat ke dalam wilayah RI. Silas Papare yang ketika itu aktif dalam Front Nasional Pembebasan Irian Barat (FNPIB) juga diminta oleh Presiden Soekarno menjadi salah seorang delegasi Indonesia dalam Perianiian New York vang Agustus ditandatangani pada 15 1962. yang mengakhiri konfrontasi Indonesia dengan Belanda perihal Irian Barat. Setelah penyatuan Irian Barat, ia kemudian diangkat menjadi anggota MPRS.

h. Konfrontasi Indonesia – Malaysia (Tahun 1963)

Pada tahun 1963, kebijakan Konfrontasi terhadap Federasi Malaysia yang baru terbentuk diumumkan oleh rezim Soekarno. Hal ini semakin memperburuk perpecahan antara faksi TNI sayap kiri dan sayap kanan, dengan faksi sayap kiri TNI dan Partai Komunis mengambil bagian dalam serangan gerilya di perbatasan antara Kalimantan dengan Malaysia, sementara faksi sayap kanan TNI sebagian besar absen dari konflik (tidak jelas apakah karena pilihan atau perintah Soekarno).

Politik konfrontasi ini selanjutnya semakin mendorong Blok Barat untuk mencari cara untuk menggulingkan Soekarno, yang dipandang sebagai ancaman terhadap stabilitas regional Asia Tenggara (begitu pula Vietnam Utara dalam pandangan Teori Domino Blok Barat). Mendalamnya konflik bersenjata ini mendekati perang terbuka antara Indonesia

dan Malaysia pada tahun 1965, meningkatkan ketidakpuasan dunia terhadap rezim Soekarno dan memperkuat peluang kekuasaan para jenderal TNI faksi sayap kanan yang pasukannya masih dekat dengan pusat kekuasaan di Jakarta.

i. Pemberontakan yang terjadi di daerah

Satu pengalaman penting dalam sejarah perkembangan negara republik Indonesia adalah kemunculan pemberontakan internal tidak lama setelah proklamasi kemerdekaan. Gerakan ini bernama Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) yang aktif di Jawa Barat. Gerakan ini dipimpin oleh Kartosuwirjo yang sebelumnya terlibat juga dalam upaya perjuangan kemerdekaan dengan pembentukan organisasi perlawanan terhadap Belanda di Jawa Barat. Akar persoalan yang menjadi permasalahan kemunculan gerakan ini adalah kekecewaan Kartosuwirjo pemerintah terhadap Republik Indonesia menyepakatai Perjanjian Renvile pada 1949. Dengan perianiian tersebut. Pemerintah RΙ dipaksa untuk meninggalkan wilayah Jawa Barat dan hanya berpusat di Yogyakarta. Gerakan perlawanan DI/TII ini baru selesai pada decade 1960an dengan ditangkapnya Kartosuwirjo yang kemudian dijatuhi hukuman mati.

Selanjutnya, gerakan lain setelah yang muncul kemerdekaan terjadi seiring dengan upaya Sukarno membangun stabilitas politik nasional melalui kebijakan Demokrasi Terpimpin pada 1957, gerakan-gerakan separatisme seperti di Sumatera dan Sulawesi dalam apa yang disebut dengan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI Permesta). Latar belakana pemberontakan PRRI/Permesta adalah rasa ketidakpuasan dari angkatan militer di daerah terhadap pusat, terutama muncul dari Sumatera dan Sulawesi.

j. Gerakan 30 September

Pada malam 30 September - 1 Oktober 1965, enam jenderal senior TNI diculik dan dieksekusi di Jakarta oleh batalyon tentara dari Resimen Tjakrabirawa (Pengawal Presiden) dalam sebuah aksi yang kemudian disebut oleh Soeharto sebagai "percobaan kudeta". Faksi sayap kanan TNI yang membawahi enam jenderal tersebut hancur, termasuk Panglima Staf Angkatan Darat yang paling berkuasa, Ahmad Yani. Sekitar 2.000 personel tentara dari kelompok tersebut menempati tiga sisi Lapangan Merdeka, dan menduduki Istana Merdeka, kantor Radio Republik Indonesia, dan pusat telekomunikasi, tetapi tidak menempati sisi timur, tempat markas Kostrad. Menyebut diri mereka "Gerakan 30 September" (disingkat "G30S"), kelompok ini mengumumkan di radio RRI sekitar pukul 7:00 WIB bahwa mereka mencoba menghentikan kudeta militer didukung oleh Central Intelligence Agency (CIA) Amerika Serikat yang direncanakan untuk menghapus Soekarno dari kekuasaan. Mereka mengumumkan telah menangkap beberapa jenderal yang tergabung dalam konspirasi tersebut, yaitu anggota "Dewan Jenderal", yang telah merencanakan kudeta militer terhadap pemerintahan Presiden Soekarno. Mereka kemudian menyatakan bahwa kudeta ini sejatinya akan berlangsung pada "Hari Angkatan Bersenjata" (5 Oktober) dengan dukungan dari CIA, dan bahwa Dewan Jenderal kemudian akan membentuk sebuah junta militer yang memegang tampuk kekuasaan Indonesia. Setelah itu, kelompok ini memproklamasikan berdirinya sebuah "Dewan Revolusi" yang terdiri dari berbagai perwira TNI terkenal dan pemimpin sipil yang akan menjadi otoritas tertinggi di Indonesia. Selain itu, mereka menyatakan bahwa Kabinet Dwikora Presiden Soekarno sebagai "demisioner" ("tidak valid").

2. Sejarah Indonesia era orde baru



Setelah Soeharto menjadi Presiden, salah satu pertama yang dilakukannya adalah mendaftarkan Indonesia menjadi anggota PBB lagi. Indonesia pada tanggal 19 September 1966 mengumumkan bahwa Indonesia "bermaksud untuk melanjutkan kerjasama dengan PBB dan melanjutkan partisipasi dalam kegiatan-kegiatan PBB", dan menjadi anggota PBB kembali pada tanggal 28 September 1966, tepat 16 tahun setelah Indonesia diterima pertama kalinya.

Pada Tahun 1968, MPR secara resmi melantik Soeharto untuk masa jabatan 5 tahun sebagai presiden, dan dia kemudian dilantik kembali secara berturut-turut pada tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998.

Presiden Soeharto memulai "Orde Baru" dalam dunia politik Indonesia dan secara dramatis mengubah kebijakan luar negeri dan dalam negeri dari jalan yang ditempuh Soekarno pada akhir masa jabatannya. Orde Baru memilih perbaikan dan perkembangan ekonomi (Pelita) sebagai tujuan utamanya dan menempuh kebijakannya melalui struktur administratif yang didominasi militer namun dengan nasihat dari ahli ekonomi

didikan Barat. Selama masa pemerintahannya, kebijakan-kebijakan ini, dan pengeksploitasian sumber daya alam secara besar-besaran menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang besar namun tidak merata di Indonesia. Contohnya, jumlah orang yang kelaparan dikurangi dengan besar pada tahun 1970-an dan 1980-an.

a. Kelahiran Surat Perintah Sebelas Maret 1966 (Supersemar)



Orde Baru lahir dari diterbitkannya Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) pada tahun 1966, yang kemudian menjadi dasar legalitasnya. Orde Baru bertujuan meletakkan kembali tatanan seluruh kehidupan rakyat, bangsa, dan negara pada kemurnian pelaksanaan Pancasila Undang-Undang Dasar 1945. Kelahiran Supersemar terjadi dalam serangkaian peristiwa pada tanggal 11 Maret 1966. Saat itu, Sidang Kabinet Dwikora yang disempurnakan yang dipimpin oleh Presiden Soekarno sedang berlangsung. Di tengah-tengah acara, ajudan presiden melaporkan bahwa di sekitar istana terdapat pasukan yang tidak dikenal. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Presiden Soekarno menyerahkan pimpinan sidang kepada Wakil Perdana Menteri (Waperdam) II Dr. Johannes Leimena dan berangkat menuju Istana Bogor, didampingi oleh Waperdam I Dr Subandrio, dan Waperdam III Chaerul Saleh. Leimena sendiri menyusul presiden segera setelah sidang berakhir.

Di tempat lain, tiga orang perwira tinggi, yaitu Mayor Jenderal Basuki Rachmat, Brigadir Jenderal M. Yusuf, dan Brigadir Jenderal Amir Machmud bertemu dengan Letnan Jenderal Soeharto selaku Menteri Panglima Angkatan Darat dan Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib) untuk meminta izin menghadap presiden. Segera setelah mendapat izin, pada hari yang sama tiga perwira tinggi ini datang ke Istana Bogor dengan tujuan melaporkan kondisi di ibu kota Jakarta meyakinkan Presiden Soekarno bahwa ABRI, khususnya AD, dalam kondisi siap siaga. Namun, mereka juga memohon agar Presiden Soekarno mengambil tindakan untuk mengatasi keadaan ini.

Menanggapi permohonan ini, Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah yang ditujukan kepada Letnan Jenderal Soeharto selaku Menteri Panglima Angkatan Darat untuk mengambil tindakan dalam rangka menjamin keamanan, ketenangan, dan stabilitas pemerintahan demi keutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia. Perumusan surat perintah ini sendiri dibantu oleh tiga perwira tinggi ABRI, yaitu Mayor Jenderal Basuki Rachmat, Brigadir Jenderal M. Yusuf, Brigadir Jenderal Amir Machmud, dan Brigadir Jenderal Sabur, Komandan Pasukan Pengawal Presiden Cakrabirawa. Surat perintah inilah yang kemudian dikenal sebagai Surat Perintah 11 Maret 1966 atau Supersemar.

b. Pembubaran Partai Komunis Indonesia



Sebagai tindak lanjut keluarnya Surat Perintah Sebelas Maret, Letnan Jenderal Soeharto mengambil beberapa tindakan. Pada tanggal 12 Maret 1966, ia mengeluarkan surat keputusan yang berisi pembubaran dan larangan bagi Partai Komunis Indonesia serta ormas-ormas vang bernaung dan berlindung atau senada dengannya untuk beraktivitas dan hidup di wilayah Indonesia. Keputusan ini kemudian diperkuat dengan Keputusan Presiden/Pangti ABRI ABRI/Mandataris MPRS No.1/3/1966 tanggal 12 Maret 1966. Keputusan pembubaran Partai Komunis Indonesia ormas-ormasnya mendapat sambutan dan dukungan karena merupakan salah satu realisasi dari Tritura.

Pada tanggal 20 Juni hingga 5 Juli 1955, diadakanlah Sidang Umum IV MPRS dengan hasil sebagai berikut:

- 1) Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 tentang Pengesahan dan Pengukuhan Supersemar;
- 2) Ketetapan MPRS No. X/MPRS/1966 mengatur Kedudukan Lembaga-Lembaga Negara Tingkat Pusat dan Daerah:
- 3) Ketetapan MPRS No. XII/MPRS/1966 tentang Kebijaksanaan Politik Luar Negeri RI Bebas Aktif;
- 4) Ketetapan MPRS No. XIII/MPRS/1966 tentang Pembentukan Kabinet Ampera;
- 5) Ketetapan MPRS No. XIX/MPRS/1966 tentang

- Peninjauan Kembali Tap. MPRS yang Bertentangan dengan UUD 1945;
- 6) Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Sumber Tertib Hukum RI dan Tata Urutan Perundang-undangan di Indonesia;
- 7) Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia dan Pernyataan Partai Komunis Indonesia dan Ormas-Ormasnya sebagai Organisasi Terlarang di Indonesia;
- 8) Hasil dari Sidang Umum IV MPRS ini menjadi landasan awal tegaknya Orde Baru dan dinilai berhasil memenuhi dua dari tiga tuntutan rakyat (tritura), yaitu pembubaran Partai Komunis Indonesia dan pembersihan kabinet dari unsur-unsur Partai Komunis Indonesia.

c. Irian Jaya

Setelah menolak supervisi dari PBB, pemerintah Indonesia melaksanakan "Act of Free Choice" (Aksi Pilihan Bebas) di Irian Jaya pada 1969 di mana 1.025 wakil kepala-kepala daerah Irian dipilih dan kemudian diberikan latihan dalam bahasa Indonesia. Mereka secara konsensus akhirnya memilih bergabung dengan Indonesia. Sebuah resolusi Sidang Umum PBB kemudian memastikan perpindahan Penolakan kekuasaan kepada Indonesia. pemerintahan Indonesia menimbulkan aktivitas-aktivitas gerilya berskala kecil pada tahun-tahun berikutnya setelah perpindahan kekuasaan tersebut. Dalam atmosfer yang lebih terbuka setelah 1998, pernyataan-pernyataan yang lebih eksplisit yang menginginkan kemerdekaan dari Indonesia telah muncul.

d. Timor Timur

Dari Tahun 1596 hingga Tahun 1975, Timor Timur adalah sebuah jajahan Portugis di pulau Timor yang dikenal sebagai Timor Portugis dan dipisahkan dari pesisir utara Australia oleh Laut Timor. Akibat kejadian politis di Portugal, pejabat Portugal secara mendadak mundur dari Timor Timur pada 1975. Dalam pemilu lokal pada tahun 1975, Fretilin, sebuah partai yang dipimpin sebagian oleh orang-orang yang membawa paham Marxisme, dan UDT, menjadi partai-partai terbesar, setelah sebelumnya membentuk aliansi untuk mengkampanyekan kemerdekaan dari Portugal.

Pada 7 Desember 1975. pasukan Indonesia masuk ke Timor Timur dalam sebuah operasi militer yang disebut Operasi mempunyai Seroja. Indonesia, yang dukungan material dan diplomatik, dibantu peralatan perseniataan yang disediakan Amerika Serikat dan Australia, berharap dengan memiliki Timor Timur mereka akan memperoleh tambahan cadangan minyak dan gas alam, serta lokasi yang strategis.

Pada 30 Agustus 1999, rakyat Timor Timur memilih untuk memisahkan diri dari Indonesia dalam sebuah pemungutan suara yang diadakan PBB. Sekitar 99% penduduk yang berhak memilih turut serta; 3/4-nya memilih untuk merdeka. Segera setelah hasilnya diumumkan, dikabarkan bahwa pihak militer Indonesia melanjutkan pengrusakan di Timor Timur, seperti merusak infrastruktur di daerah tersebut.

Pada Oktober 1999, MPR membatalkan dekret 1976 yang mengintegrasikan Timor Timur ke wilayah Indonesia, dan Otorita Transisi PBB (UNTAET) mengambil alih tanggung jawab untuk memerintah Timor Timur sehingga kemerdekaan penuh dicapai pada Mei 2002 sebagai negara Timor Leste.

e. Krisis ekonomi

1997, Pada pertengahan Indonesia diserang krisis keuangan dan ekonomi Asia (untuk lebih jelas lihat: Krisis finansial Asia), disertai kemarau terburuk dalam 50 tahun terakhir dan harga minyak, gas dan komoditas ekspor lainnya yang semakin jatuh. Rupiah jatuh, inflasi meningkat perpindahan modal dipercepat. tajam. dan demonstran, yang awalnya dipimpin para mahasiswa, meminta pengunduran diri Soeharto. Di tengah gejolak kemarahan massa yang meluas, serta ribuan mahasiswa DPR/MPR. vang menduduki gedung Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998, tiga bulan setelah MPR melantiknya untuk masa bakti ketujuh. Soeharto kemudian memilih sang Wakil Presiden, B. J. Habibie, untuk menjadi presiden ketiga Indonesia.

3. Sejarah Indonesia Era Reformasi Tahun 1998



Jatuhnya pemerintahan Presiden Soeharto pada Mei 1998, menjadi awal babak baru bagi Indonesia. Era tersebut dikenal dengan era reformasi yang dipandang sebagai awal periode demokrasi dengan sistem politik yang terbuka dan liberal. Reformasi adalah perubahan terhadap suatu sistem yang telah ada pada suatu negara. Diambil dari buku Revolusi Politik Kaum Muda (2008) karya Muhammad Umar Syadat Hasibuan,

reformasi lahir setelah negara kita ini mengalami krisis yang melanda berbagai aspek, mulai dari ekonomi, politik, hukum, kepercayaan, dan kebutuhan pokok.

a. Pemerintahan B.J. Habibie



Setelah pengunduran diri Soeharto, Wakil Presiden B.J. Habibie dilantik sebagai presiden dan melakukan berbagai reformasi politik. Pada Februari 1999, pemerintahan Habibie mengesahkan Undang-Undang Partai Politik yang mencabut pembatasan jumlah partai politik (parpol). Sebelumnya, pada masa Soeharto, hanya tiga parpol yang diperbolehkan. Parpol juga tidak diwajibkan berideologi Pancasila. Hal ini mengakibatkan partai politik bermunculan dan 48 di antaranya akan bersaing dalam pemilihan legislatif 1999.

b. Pemerintahan Abdurrahman Wahid



Pada 1999, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menjadi Presiden Indonesia. Kabinet pertama, yang diberi nama Kabinet Persatuan Nasional, adalah kabinet koalisi yang mewakili beberapa partai politik: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Keadilan (PK). Perwakilan nonpartisan dan militer (TNI) juga ditempatkan dalam kabinet. Salah satu reformasi administrasi negara yang dilakukan Gus Dur adalah penghapusan Kementerian Penerangan, senjata utama Orde Baru untuk mengendalikan media, dan pembubaran Kementerian Kesejahteraan, yang telah menjadi korup pada masa Orde Baru.



c. Pemerintahan Megawati Soekarno Putri

Pada Sidang Umum MPR pertama pada Agustus 2000, Wahid memberikan laporan Presiden pertanggung jawabannya. Pada 29 Januari 2001, ribuan demonstran menyerbu MPR dan meminta Presiden agar mengundurkan diri dengan alasan keterlibatannya dalam skandal korupsi. Di bawah tekanan dari MPR untuk memperbaiki manajemen dan koordinasi di dalam pemerintahannya, dia mengedarkan keputusan presiden yang memberikan kekuasaan negara sehari-hari kepada wakil presiden Megawati. Megawati mengambil alih jabatan presiden tak lama kemudian. Kabinet pada masa pemerintahan Megawati disebut dengan Kabinet Gotong Royong.

Tahun 2002, Masa pemerintahan ini mendapat pukulan besar ketika Pulau Sipadan dan Ligitan lepas dari NKRI berdasarkan keputusan Mahkamah Internasional.

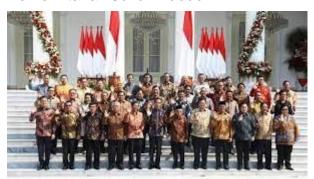
d. Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono



Pada 2004, pemilu satu hari terbesar di dunia diselenggarakan, dengan Susilo Bambang Yudhoyono terpilih sebagai presiden pertama yang dipilih secara langsung oleh rakyat, kemudian membentuk Kabinet Indonesia Bersatu. Pemerintah ini pada awal masa kerjanya telah menerima berbagai cobaan dan tantangan besar, seperti gempa bumi besar di Aceh dan Nias pada Desember 2004 yang meluluh lantakkan sebagian dari Aceh serta gempa bumi lain pada awal 2005 yang mengguncang Sumatra.

Pada 17 Juli 2005, sebuah kesepakatan bersejarah berhasil dicapai antara pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka yang bertujuan mengakhiri konflik berkepanjangan selama 30 tahun di wilayah Aceh.

e. Pemerintahan Joko Widodo



Pada pemilu presiden 2014, Joko Widodo (Jokowi) bersama dengan Jusuf Kalla (yang kembali dicalonkan sebagai wakil presiden) mengalahkan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. Jokowi adalah presiden pertama tanpa latar belakang politik atau militer yang tinggi. Dalam kampanye berjanji pemilu 2014, Jokowi akan meningkatkan pertumbuhan PDB hingga 7% dan mengakhiri kebijakan bagi-bagi kursi (memberikan jabatan pemerintahan pada koalisi politiknya), meski janji tersebut belum terpenuhi. Pada masa pemerintahannya, rupiah mencapai rekor terendah dalam 20 tahun terakhir.

4. Nilai-nilai kejuangan bangsa Indonesia pasca kemerdekaan

Peristiwa-peristiwa sejarah yang terjadi dalam perang kemerdekaan, banyak mengandung nilai-nilai positif sebagai nilai-nilai perjuangan yang penting untuk kamu ketahui. Beberapa nilai perjuangan yang dimaksud antara lain sebagai berikut:

a. Persatuan dan Kesatuan

Persatuan dan kesatuan adalah nilai yang sangat penting di dalam setiap bentuk perjuangan. Semua organisasi atau kekuatan yang ada, sekalipun dengan paham/ideologi atau organisasi yang berbeda, namun tetap bersatu dalam menghadapi kaum penjajah untuk mencapai kemerdekaan. Pada masa perlucutan senjata terhadap Jepang, perang melawan Sekutu maupun Belanda, semua anggota TNI, berbagai anggota kelaskaran dan rakyat bersatu padu.

Persatuan dan kesatuan senantiasa menjadi jiwa dan kekuatan perjuangan. Hal yang cukup menonjol misalnya pada waktu Belanda menciptakan negara-negara bagian dan daerah otonom dalam negara federal. Hal tersebut jelas memperlihatkan bahwa Belanda berusaha memecah belah bangsa Indonesia. Oleh karena itu, timbul berbagai kesulitan di lingkungan rakyat Indonesia baik secara politis maupun ekonomis. Hal ini disadari benar oleh rakyat Indonesia,

sehingga banyak yang menuntut untuk kembali ke negara kesatuan. Akhirnya tercapai pada tanggal 17 Desember 1950. Negara kesatuan dan nilai persatuan cocok dengan jiwa bangsa Indonesia.

b. Rela Berkorban dan Tanpa Pamrih

Nilai kejuangan bangsa yang sangat menonjol di masa kemerdekaan adalah rela berkorban. perana pemimpin, rakyat, dan para pejuang pada umumnya benarbenar rela berkorban tanpa pamrih. Sebagai contoh Jenderal Sudirman yang dalam keadaan sakit, hanya dengan satu paru-paru tetap memimpin perang gerilya. Ia telah menempuh perjalanan kurang lebih 1000 km dalam waktu sekitar enam bulan dengan penuh derita, lapar dan dahaga, tetapi semangatnya tak pernah padam. Ia tidak hanya mempertaruhkan jiwa dan raganya tetapi juga mengorbankan harta benda untuk tegaknya cita-cita Proklamasi, Negara Indonesia yang bersatu, sejahtera, aman dan tenteram. Begitu juga tokoh-tokoh pejuang yang lain.

Mereka telah mempertaruhkan jiwa dan raganya, mengorbankan waktu dan harta bendanya, demi perjuangan kemerdekaan. Kita tidak dapat menghitung berapa para pejuang kita yang gugur di medan juang, berapa orang yang menanggung cacat dan menderita, akibat harus perjuangannya. Juga berapa jumlah harta benda yang dikorbankan demi tegaknya kemerdekaan, semua tidak dapat kita perhitungkan.

c. Cinta pada Tanah Air

Rasa cinta pada tanah air merupakan faktor pendorong yang sangat kuat bagi para pejuang kita untuk berjuang di medan laga. Timbullah semangat patriotisme di kalangan para pejuang kita untuk melawan penjajah. Sebagai perwujudan dari rasa cinta tanah air, cinta pada tumpah darahnya maka munculah berbagai perlawanan di daerah untuk melawan kekuatan kaum penjajah. Di Sumatra, di Jawa, Bali, Sulawesi dan tempat-tempat lain, muncul pergolakan dan perlawanan menentang kekuatan asing, demi kemerdekaan tanah airnya.

d. Saling Pengertian dan Harga Menghargai

Di dalam perjuangan mencapai dan mempertahankan kemerdekaan, diperlukan saling pengertian dan sikap saling menghargai di antara para pejuang. Sebagai contoh perbedaan pandangan antara pemuda (Syahrir dkk.) dengan Bung Karno-Bung Hatta dari golongan tua, tetapi karena saling pengertian dan saling menghargai, maka kesepakatan dapat tercapai. Teks proklamasi dapat diselesaikan dan kemerdekaan dapat diproklamasikan, adalah bukti nyata sebuah kekompakan dan saling

pengertian di antara para tokoh nasional.

Berangkat dari sikap saling pengertian dan saling menghargai juga dapat memupuk rasa persatuan dan menghindarkan perpecahan. Timbullah rasa kebersamaan. Sebagai contoh, tokoh-tokoh Islam yang pernah menjadi Panitia Sembilan dan PPKI, memahami dan menghargai kelompok- kelompok lain, sehingga tidak keberatan untuk menghilangkan kata-kata dalam Piagam Jakarta, "Ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya" dan diganti dengan "Ketuhanan Yang Maha Esa".

Kelompok sipil lebih menekankan cara diplomasi atau perundingan damai, sedangkan kaum militer menekankan strategi perjuangan bersenjata. Ternyata berkat saling menghargai, baik perjuangan diplomasi maupun perjuangan bersenjata dapat saling mendukung. Begitu juga ketika terjadi Agresi Belanda II, para pemimpin sipil ingin bertahan di pusat ibu kota (sehingga akhirnya ditawan Belanda) sedangkan kaum militer ingin ke luar kota melancarkan gerilya. Kaum militer tidak memaksakan kehendaknya agar kaum sipil ikut ke luar kota untuk Semua bergerilya, dan begitu sebaliknya. hikmahnya, perjuangan diplomasi bahwa maupun perjuangan bersenjata saling mengisi dan sama-sama pentingnya.

Nilai-nilai perjuangan seperti persatuan dan kesatuan, rela berkorban dan tanpa pamrih, cinta tanah air, saling pengertian atau tenggang rasa dan harga menghargai, merupakan nilai-nilai yang penting untuk dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai itu tidak hanya penting di masa perjuangan menentang penjajahan, tetapi juga dalam kegiatan pembangunan sekarang. Apabila kita memahami dan kemudian mengamalkan nilai-nilai tersebut, menunjukkan adanya kesadaran sejarah yang tinggi. Setiap orang yang memiliki kesadaran sejarah semacam itu tentunya tidak akan korupsi, tidak akan memperkaya diri dengan mengorbankan orang lain, tidak akan sewenangwenang dan tidak akan menyebarkan isu-isu perpecahan yang hanya untuk kepentingan golongan sendiri. Dengan ini, maka pembangunan demi kemaslahatan umum akan dapat tercapai.



RANGKUMAN

- Masa pendudukan Jepang di Nusantara atau Indonesia yang saat itu masih menjadi koloni Belanda dimulai pada tahun 1942 dan berakhir pada tanggal 17 Agustus 1945 seiring dengan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia oleh Ir. Soekarno dan M. Hatta
- Pada 1968, MPR secara resmi melantik Soeharto untuk masa jabatan 5 tahun sebagai presiden, dan dia kemudian dilantik kembali secara berturut-turut pada tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998.
- Jatuhnya pemerintahan Presiden Soeharto pada Mei 1998, menjadi awal babak baru bagi Indonesia. Era tersebut dikenal dengan era reformasi yang dipandang sebagai awal periode demokrasi dengan sistem politik yang terbuka dan liberal.



LATIHAN

- 1. Jelaskan sejarah Indonesia era kemerdekaan!
- 2. Jelaskan sejarah Indonesia era orde baru!
- 3. Jelaskan sejarah Indonesia era reformasi!
- 4. Jelaskan nilai-nilai kejuangan bangsa Indonesia pasca kemerdekaan!

MODUL 03

KEUTUHAN NKRI DALAM KEBHINEKAAN





PENGANTAR

Dalam modul ini membahas materi yaitu konsep keutuhan NKRI dalam kebhinekaan, integrasi daerah di Indonesia dalam keutuhan NKRI secara Historis dan Yuridis, ketahanan terhadap proganda di Indonesia, sinergitas Polri dan TNI sebagai perekat kebhinekaan nusantara, otonomi khusus di Indonesia, pembangunan dan konektivitas di Indonesia, kekayaan alam yang tersebar di Indonesia.

Tujuannya adalah agar peserta didik dapat memahami keutuhan NKRI dalam kebhinekaan.



KOMPETENSI DASAR

Memahami keutuhan NKRI dalam kebhinekaan.

Indikator Hasil Belajar:

- 1. menjelaskan konsep keutuhan NKRI dalam kebhinekaan;
- 2. menjelaskan integrasi nasional dalam keutuhan NKRI;
- menjelaskan otonomi khusus di Indonesia;
- 4. menjelaskan ketahanan terhadap proganda kelompok tertentu terhadap keutuhan NKRI;
- 5. menjelaskan pembangunan dan konektivitas di Indonesia;
- 6. menjelaskan kekayaan alam yang tersebar di Indonesia;
- 7. menjelaskan sinergitas Polri dan TNI sebagai perekat kebhinekaan nusantara.



MATERI PELAJARAN

Pokok Bahasan:

Keutuhan NKRI dalam kebhinekaan.

Subpokok Bahasan:

- Konsep keutuhan NKRI dalam kebhinekaan;
- Integrasi nasional dalam keutuhan NKRI;
- 3. Otonomi khusus di Indonesia;
- Ketahanan terhadap proganda kelompok tertentu terhadap keutuhan NKRI;
- 5. Pembangunan dan konektivitas di Indonesia;
- 6. Kekayaan alam yang tersebar di Indonesia;
- 7. Sinergitas Polri dan TNI sebagai perekat kebhinekaan nusantara.



METODE PEMBELAJARAN

1. Metode Ceramah

Metode ini digunakan untuk menyampaikan materi tentang keutuhan NKRI dalam kebhinekaan.

2. Metode Tanya jawab.

Metode ini digunakan untuk tanya jawab tentang materi yang disampaikan.

3. Metode Brainstorming (curah pendapat).

Metode ini digunakan untuk meng-eksplore pendapat peserta didik tentang pemahaman awal materi yang akan dibahas.

4. Metode Simulasi EL (Experiental Learning)

Metode ini digunakan dalam proses belajar dimana peserta didik terlibat aktif di dalam suatu situasi untuk mendapatkan nilai-nilai inspirasi dan terobosan dalam kegiatan yang terstruktur.

5. Metode NLP (Neuro Linguistic Programming)

Metode ini digunakan untuk mengaitkan otak sadar dan otak bawah sadar (neuro) dengan memanfaatkan penggunaan bahasa (linguistic) yang dilakukan secara berulang-ulang (programming).

6. Metode penugasan

Metode ini digunakan pendidik untuk menugaskan peserta didik tentang materi yang telah diberikan.

7. Metode Diskusi

Metode ini digunakan untuk mendiskusikan materi yang akan dibahas/disampaikan kepada peserta didik.



ALAT/MEDIA, BAHAN DAN SUMBER

1. Alat/media:

- a. Whiteboard:
- b. Laptop;
- c. LCD In focus:
- d. Papan Flipchart;
- e. Lasser point;
- f. Pengeras Suara/sound system.

2. Bahan:

- a. Kertas Flipchart;
- b. Alat Tulis.

3. Sumber:

- Hanjar Sejarah Indonesia Diktuk Bintara Polri;
- b. https://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/download/422/236
- c. Paparan pendidik.



KEGIATAN PEMBELAJARAN

1. Tahap awal: 10 menit

- a. Pendidik melakukan *overview* materi sebelumnya;
- b. Pendidik menyampaikan tujuan dan materi yang akan disampaikan dalam pembelajaran.

2. Tahap inti : 160 menit

- a. Tahap Inti I: Penyampaian materi tentang keutuhan NKRI dalam kebhinekaan: 60 menit.
 - 1) Pendidik menyampaikan materi tentang bertahan hidup di laut;
 - 2) Peserta didik memperhatikan/menyimak dan mencatat hal-hal yang dianggap penting;

- 3) Peserta didik melaksanakan curah pendapat tentang materi yang disampaikan oleh pendidik;
- 4) Pendidik dan peserta didik melaksanakan tanya jawab tentang materi yang telah disampaikan.

b. Tahap Inti II: Diskusi tentang nilai-nilai kejuangan sejarah Indonesia: 100 menit.

- 1) Pendidik menugaskan peserta didik untuk mendiskusikan materi yang telah disampaikan.;
- 2) Peserta didik melaksanakan diskusi sesuai instruksi pendidik;
- 3) Pendidik memfasilitasi jalannya diskusi;
- 4) Pendidik menyimpulkan hasil dari diskusi.

3. Tahap akhir 10 menit.

- a. Pendidik memberikan ulasan dan penguatan materi pembelajaran secara umum.
- b. Pendidik mengecek penguasaan materi dengan bertanya secara lisan dan acak kepada peserta didik.
- c. Pendidik merumuskan *Learning Point*/relevansi yang dikaitkan dengan pelaksanaan tugas dilapangan.
- d. Pendidik menugaskan peserta didik untuk meresume materi yang telah disampaikan.
- 4. Ujian Akhir (Tes sumatif): 90 Menit



Tagihan / Tugas

- Peserta didik secara individu mengumpulkan hasil penugasan pembuatan resume tentang materi yang telah disampaikan berupa tulisan tangan paling lambat 1 hari setalah penyampaian materi.
- 2. Peserta didik secara kelompok mengumpulkan materi paparan hasil diskusi kepada Pendidik.



LEMBAR KEGIATAN

- 1. Pendidik menugaskan kepada peserta didik untuk meresume materi yang telah disampaikan.
- 2. Pelaksanaan diskusi:
 - a. Pendidik membagi kelas menjadi 4 kelompok.
 - b. Peserta didik melaksanakan diskusi dengan materi :
 - Kelompok 1 keutuhan NKRI dalam kebhinekaan.
 - Kelompok 2
 integrasi nasional dalam keutuhan NKRI.
 - Kelompok 3
 pembangunan dan konektivitas di Indonesia
 - Kelompok 4 sinergitas Polri dan TNI sebagai perekat kebhinekaan NKRI
 - c. Pendidik bertindak sebagai fasilitator dalam jalannya diskusi.
 - d. Pendidik mengambil kesimpulan diskusi.
 - e. Peserta didik mengumpulkan hasil diskusi kelompok..



BAHAN BACAAN

KEUTUHAN NKRI DALAM KEBHINEKAAN

1. Konsep keutuhan NKRI dalam kebhinekaan

Negara Kesatuan republik Indonesia dianugrahi wilayah yang luas dan kekayaan alam yang beraneka ragam untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Oleh karena itu, semua rakyat Indonesia berkewajiban untuk melindungi dan mempertahankan wilayah Indonesia agar tetap utuh. Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak berdiri dengan sendirinya, akan tetapi, melalui perjuangan para pejuang yang dilakukan dengan proses yang sangat panjang. Mereka telah mengorbankan harta dan bahkan nyawa mereka demi Indonesia tercinta.

a. Pengertian keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, keutuhan berasal dari kata utuh yang berarti dalam keadaan sempurna seperti semula. Utuh juga berarti tidak bercerai berai atau tidak pecah belah. Jadi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia artinya adalah bahwa Indonesia merupakan Negara kesatuan yang memiliki kedaulatan, memiliki tujuan nasional, dan berdiri secara utuh baik wilayahnya, rakyatnya, ataupun pemerintahannya.

Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui halhal berikut:

- 1) Indonesia yang utuh dan tidak mudan terpecah belah.
- 2) Hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya baik.
- 3) Tidak ada pergolakan, peperangan, pemberontakan, ataupun perpecahan di antara rakyat.
- 4) Situasi Negara yang aman, nyaman, dan damai.

Jika Indonesia bias mencapai keempat butir di atas maka Indonesia adalah Negara yang utuh. Sejak proklamasi kemerdekaan, keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia mengalami pasang surut. Gangguan demi gangguan yang berusaha membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah banyak terjadi.

Keutuhan wilayah sebuah Negara sangat penting, karena keutuhan wilayah suatu Negara sangat menentukan berlangsung tidaknya pemerintahan suatu Negara. Maka, semua Negara berusaha untuk menjaga keutuhan wilayahnya. Untuk menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diperlukan sikap-sikap:

1) Cinta tanah air



Sebagai warga Negara Indonesia kita wajib mempunyai rasa cinta terhadap tanah air. Cinta tanah air dan bangsa dapat diwujudkan dalam berbagai hal, antara lain:

- Menjaga keamanan wilayah negaranya dari ancaman yang dating dari luar maupun dari dalam negeri.
- b) Menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan.
- c) Mengolah kekayaan alam dengan menjaga ekosistem guna meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- Rajin belajar guna menguasai ilmu pengetahuan dari berbagai disiplin untuk diabdikan kepada Negara.

2) Membina persatuan dan kesatuan

Pembinaan persatuan dan kesatuan harus dilingkungan dimanapun kita berada, baik dilingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan Negara. Tindakan yang menunjukkan usaha membina persatuan dan kesatuan antara lain:

- a) Menyelenggarakan kerja sama antar daerah.
- b) Menjalin pegaulan antar suku bangsa.
- c) Memberi bantuan tanpa membedakan suku bangsa atau asal daerah.
- d) Mempelajari berbagai kesenian dari wilayah lain.

3) Rela berkorban

Sikap rela berkorban adalah sikap yang mencerminkan adanya kesediaan dan keikhlasan memberikan sesuatu yang dimiliki untuk orang lain, walaupun akan menimbulkan penderitaan bagi diri sendiri. Dalam pengertian yang lebih sederhana, rela berkorban adalah sikap dan perilaku yang tindakannya dilakukan dengan ikhlas serta mendahulukan kepentingan orang lain dari pada kepentingan diri sendiri. Sikap rela

berkorban ditunjukkan dengan cara membiasakan merelakan sebagian kepentingan kita untuk kepentingan orang lain atau kepentingan bersama.

b. Pentingnya keutuhan NKRI

Pentingnya keutuhan NKRI Dikutip dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayan RI, menurut cara pandang geopolitik, kelangsungan hidup suatu bangsa tergantung kepada ruang untuk hidupnya atau wilayah negara tersebut.

Demi kelangsungan hidup bangsa Indonesia, maka wilayah negara Republik Indonesia harus dipertahankan. Semua Warga Negara Indonesia (WNI) berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Warga Negara Indonesia juga berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.

Keutuhan NKRI, menentukan tercapainya tujuan negara Indonesia yang terdapat dalam usaha pertahanan dan negara. Keutuhan NKRI, menentukan tercapainya tujuan negara Indonesia yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu: "Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia: kehidupan mencerdaskan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum; dan ikut serta melaksanakan ketertiban kemerdekaan. dunia vang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial".

c. Upaya-Upaya dalam Menjaga Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Setiap rakyat Indonesia mempunyai kewajiban dan tanggungjawab untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai generasi bangsa, kita juga harus turut serta dalam menjaga dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. UUD 1945 Pasal 30 Ayat (1) dan (2) mengatur hal ini. Keikutsertaan rakyat dalam usaha membela Negara demi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dilakukan melalui bela Negara secara fisik dan nonfisik.

1) Bela Negara secara fisik

Menurut UUD No. 3 Tahun 2002 tentang pertahanan Negara, keikutsertaan warga Negara dalam usaha bela Negara dapat dilakukan dengan cara bergabung dalam:

- a) Anggota TNI;
- b) Jajaran kepolisian RI (Polri);
- c) Pelatihan dasar kemiliteran, pertahanan rakyat Indonesia.

2) Bela Negara secara nonfisik

Berdasarkan Undang-Undang Tahun 2002, keikutsertaan warga Negara dalam bela Negara secara nonfisik dapat dilakukan melalui berbagai bentuk, misalnya:

- Meningkatkan kesadaran berbangsa dengan cara menghargai perbedaan pendapat dan tidak memaksakan kehendak kita kepada orang lain.
- b) Menanamkan kecintaan terhadap tanah air, melalui pengabdian tulus dalam membangun masyarakat.
- c) Berperan serta dalam memajukan bangsa dan Negara dalam karya nyata.
- d) Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dan menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menangkal pengaruh budaya-budaya asing yang tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan bangsa Indonesia dengan lebih bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2. Integrasi nasional di Indonesia dalam keutuhan NKRI

a. Pengertian integrasi nasional

pengertian ini sebagai suatu keutuhan menyeluruh sebuah bangsa. Bangsa yang utuh sebagai satu kesatuan yang didalamnya ada beraneka ragam atau kemajemukan adalah bangsa yang terintegrasi.

pengertiannya adalah proses menciptakan bangsa yang satu dalam keragaman. Kita hidup di Indonesia dibawah kemajemukan. Tidak hanya ras, agama, etnisitas dan bahasa yang majemuk, melainkan juga preferensi politik, seni, budaya, nasib dan sebagainya.

Perbedaan itu keniscayaan. Tetapi kita perlu berintegrasi satu sama lain agar dapat hidup dalam satu kesatuan, satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Oleh karena itulah, integrasi sangat penting. Sebagai salah satunya dalam membentuk identitas bersama, yaitu identitas sebagai bangsa Indonesia. Integrasi ini merupakan upaya membangun identitas nasional.

b. Jenis-jenis integrasi nasional

Terdapat beberapa jenis yang sering disampaikan di ruang kelas. Perbedaan jenis ini hanya untuk menurunkan beragam bentuknya. Nantinya kita bisa membangun integrasi ini secara lebih konkret. Beberapa jenis yang dimaksud diantaranya sebagai berikut:

- 1) Integrasi bangsa
- 2) Integrasi wilayah
- 3) Integrasi nilai
- 4) Integrasi elit-massa
- 5) Integrasi tingkah laku
- c. Tujuan Integrasi nasional

Sebagaimana disinggung di awal, integrasi sangat penting bagi sebuah bangsa. Untuk mengetahui alasannya, kita perlu mengulas singkat di bagian ini. Diantaranya sebagai berikut:

- 1) Membangun persatuan dan kesatuan
- 2) Menguatkan identitas nasional
- 3) Membangun kedaulatan bangsa
- d. Wilayah yang Integrasi dengan NKRI

Provinsi Papua sebagai bagian dari Republik Indonesia, merupakan salah satu wilayah yang rentan terhadap masalah integrasi nasional. Jika diingat sejarah integrasi Papua ke Indonesia, maka wilayah ini berbeda dari wilayah lain di Indonesia yang dalam periode lima tahun sesudah proklamasi 17 Agustus 1945 dapat dibebaskan dari cengkeraman penjajah. Sejarah integrasi Papua mencatat suatu perjuangan yang relatif panjang, yaitu selama lebih kurang 14 tahun, berawal dari Konferensi Meja Bundar 1949 hingga Perianjian New York 1962 (Pamungkas, 2015, p. 89). Dengan demikian, dapat dipahami bahwa Papua adalah satu-satunya provinsi yang "kembali ke pangkuan ibu pertiwi" melalui Perjanjian New York yang ditandatangani oleh Belanda dan Indonesia pada 15 Agustus 1962. Berdasar isi perjanjian tersebut, pada 1 Oktober 1962, dilakukan penyerahan kekuasaan dari pemerintah Belanda kepada pemerintah Indonesia. ke Indonesia juga diperkuat dengan Integrasi Papua pengakuan Perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yaitu United Nations Temporary Executive Authority menyerahkan kekuasaan administrasi (UNTEA) yang tersebut kepada pemerintah Indonesia pada 1 Mei 1963.

Papua yang dulu bernama Irian Jaya adalah wilayah RI paling timur. Walau lokasinya jauh sekali dari pusat Pemerintahan Indonesia, namun tetap diperhatikan, terutama pada pemerintahan Presiden Joko Widodo. Di Papua sudah ada berbagai pembangunan, baik dari segi infrastruktur, maupun pembangunan sumber daya alam dan sumber daya manusia.

Berbagai kemajuan yang ada di Papua saat ini seperti Bandara Internasional Sentani dan Jembatan Youtefa, serta Jalan Trans Papua dibuat demi kesejahteraan rakyat Papua, karena mereka adalah warga negara NKRI. Pemerintah tidak pilih kasih dan membangun Papua agar penduduknya juga merasakan modernitas.

Dengan adanya kemajuan ini maka penduduk akan merasakan kelancaran di bidang transportasi. Mereka tak lagi mengandalkan pesawat terbang yang biayanya sangat mahal. Namun bisa melalui Jalan Trans Papua yang sudah lancar. Penduduk merasa senang karena mereka merasa diperhatikan oleh pemerintah pusat.

Selain itu, pemerintah juga mengangkat beberapa putra Papua jadi pejabat di Jakarta, karena mereka adalah WNI yang cerdas dan potensial. Dulu ada Freddy Numberi yang pernah menjabat sebagai menteri. Lantas sekarang ada Billy Mambrasar yang menjadi staf khusus Presiden Jokowi.

Ketika masyarakat Papua sudah bangga jadi bagian dari NKRI, maka misi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) gagal total. Mereka tak bisa memisahkan provinsi Papua dan Papua Barat dari Indonesia, karena kedua wilayah ini adalah wilayah resmi NKRI. Jadi, Republik Federal Papua Barat tidak dapat didirikan, karena tidak sah di mata hukum.

3. Otonomi khusus di Indonesia

a. Pengertian otonomi khusus

Otonomi khusus merupakan kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada provinsi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Istilah otonomi ini dapat diartikan sebagai kebebasan rakyat untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

- b. Wilayah yang diberikan otonomi khusus
 - 1) Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta



Sementara di Provinsi Yogyakarta, tidak ada pemilihan kepala daerah provinsi. Sultan Ngayogyakarta Hadiningrat sudah pasti menjabat Gubernur DI Yogyakarta dan Adipati Pakualaman sudah pasti menjabat wakil gubernur.

Sebelum terbentuknya NKRI, Kasultanan

Ngayogyakarta Hadiningratsudah diakui oleh Belanda sebagai sebuah negara berdaulat dengan sebutan *Zelfbestuurlandschappen* atau Daerah Swapraja.

Usai Jepang terusir dari bumi pertiwi, Yogya sangat siap menjadi negara merdeka yang berdualat, lengkap dengan wilayah, harta, penduduk, serta sistem pemerintahan monarki khas mereka. Namun, Sultan Yogya Sri Sultan Hamengkubuwono (HB) IX menyatakan bahwa kesultanannya merupakan bagian dari NKRI.

Sri Sultan HB IX juga mendonasikan hampir seluruh harta kerajaan untuk penyelenggaraan pemeritahan NKRI di masa-masa awal kemerdekaan ketika Yogya menjadi Ibu Kota Indonesia pada 1946 dan 1949.

Atas jasa-jasanya serta latar belakang sejarah tersebut, Pemerintah Indonesia mengeluarkan UU Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan UU No. 3 dan No. 19 Tahun 1950 tentang Pementukan Daerah Istimewa Yogyakarta.

2) Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta

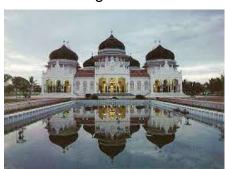


Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang. Selain itu, negara mengakui dan menghormati hak-hak khusus dan istimewa sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta (Provinsi DKI Jakarta) sebagai satuan pemerintahan yang bersifat khusus dalam kedudukannya sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sebagai daerah otonom memiliki fungsi dan peran yang penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, perlu diberikan kekhususan

tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk itulah Pemerintah Pusat mengeluarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia (LN 2007 No. 93; TLN 4744). UU ini mengatur kekhususan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu kota Negara. Aturan sebagai daerah otonom tingkat provinsi dan lain sebagainya tetap terikat pada peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah.

3) Provinsi Nangro Aceh Darussalam (NAD)



adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan Republik prinsip Negara Kesatuan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.

Pengakuan Negara atas keistimewaan dan kekhususan daerah Aceh terakhir diberikan melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (LN 2006 No 62, TLN 4633). UU Pemerintahan Aceh ini tidak terlepas dari Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) antara Pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005 dan merupakan suatu bentuk rekonsiliasi secara bermartabat menuju pembangunan sosial, ekonomi, serta politik di Aceh secara berkelanjutan.

Pengakuan sifat istimewa dan khusus oleh Negara kepada Aceh sebenarnya telah melalui perjalanan waktu yang panjang. Tercatat setidaknya ada tiga peraturan penting yang pernah diberlakukan bagi keistimewaan dan kekhususan Aceh yaitu Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor

1/Missi/1959 tentang Keistimewaan Provinsi Aceh, UU 44/1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh, dan UU 18/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Aceh. Dengan dikeluarkannya UU Pemerintahan Aceh, diharapkan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan di Aceh untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan yang berkeadilan dan keadilan yang berkesejahteraan di Aceh.

4) Provinsi Papua dan Papua Barat



Provinsi Papua adalah Provinsi Irian Jaya yang diberi Otonomi Khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi Khusus sendiri adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua, termasuk provinsi-provinsi hasil pemekaran dari Provinsi Papua, untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua. Otonomi ini diberikan oleh Negara Republik Indonesia melalui Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 (LN 2001 No. 135 TLN No 4151).

Pemberian Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan, penegakan supremasi hukum, penghormatan terhadap HAM, percepatan peningkatan pembangunan ekonomi, kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Papua, dalam rangka kesetaraan dan keseimbangan dengan kemajuan provinsi lain. Otonomi khusus melalui UU menempatkan 21/2001 orang asli Papua penduduk Papua pada umumnya sebagai subjek utama. Orang asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua. Sedangkan penduduk Papua, adalah semua orang yang menurut ketentuan yang berlaku terdaftar dan bertempat tinggal di Provinsi Papua.

Keberadaan Pemerintah. Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta perangkat di semua diarahkan untuk memberikan bawahnya, pelayanan terbaik dan pemberdayaan rakyat. Undangundang ini juga mengandung semangat penyelesaian rekonsiliasi. masalah dan antara lain dengan pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Pembentukan komisi dimaksudkan ini untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi pada masa lalu dengan tujuan memantapkan persatuan dan kesatuan nasional Indonesia di Provinsi Papua.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua Dan Provinsi Papua Barat, Dalam rangka Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dan sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka diperlukan langkah-langkah terobosan, terpadu, tepat, fokus, dan sinergi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk mewujudkan masyarakat Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang maju, sejahtera, damai, dan bermartabat di dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk:

- a) Mengambil langkah-langkah dan melakukan pengawalan yang bersifat terobosan, terpadu, tepat, fokus, dan sinergi sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing secara terkoordinasi dan terintegrasi untuk mempercepat pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
- b) Dalam mengambil langkah-langkah tersebut agar dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut:
 - (1) Pendekatan tata kelola pemerintahan yang baik, terbuka dan partisipatif yang didukung oleh Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan kebijakan yang berbasis data dan informasi;
 - (2) Pendekatan pembangunan Papua dari perspektif sosial budaya, wilayah adat, dan zona ekologis dalam rangka pembangunan berkelanjutan, dan fokus pada Orang Asli Papua (OAP):

- (3) Percepatan pelaksanaan program pembangunan berbasis distrik (kecamatan) dan kampung di wilayah terpencil, wilayah tertinggal, wilayah pedalaman, pulau-pulau kecil, perbatasan negara, dan pegunungan yang sulit dijangkau;
- (4) Penerapan pendekatan dialog dengan semua komponen masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga penyelenggara pemerintahan daerah;
- (5) Pendampingan dan peningkatan terhadap aparatur pemerintah daerah dan pelibatan peran serta masyarakat;
- (6) Pemberdayaan dan pelibatan aktif masyarakat lokal dan tokoh adat dalam pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik;
- (7) Pemberdayaan pengusaha OAP dan pengusaha lokal Papua;
- Peningkatan kerja sama, kemitraan, dan (8) kolaborasi dengan mitra pembangunan internasional. dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, wiramsaha sosial, akademisi dan filantropi, pemangku kepentingan lainnya melalui instrumen kemitraan multi pihak;
- (9) Peningkatan pengelolaan komunikasi publik dan diplomasi yang terpadu dan terintegrasi;
- (10) Peningkatan kerja sama kementerian/lembaga, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, pemerintah daerah, tokoh dan organisasi kemasyarakatan dalam menciptakan Wilayah Pulau Papua yang aman, stabil, dan damai; dan
- (11) Penguatan koordinasi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan di Wilayah Pulau Papua.
- 4. Ketahanan terhadap propaganda kelompok tertentu terhadap keutuhan NKRI.
 - a. Pengertian Propaganda

Propaganda (dari bahasa Latin modern: propagare yang berarti mengembangkan atau memekarkan) adalah rangkaian pesan yang bertujuan untuk memengaruhi pendapat dan kelakuan masyarakat atau sekelompok orang.

Propaganda tidak menyampaikan informasi secara obyektif, tetapi memberikan informasi yang dirancang untuk memengaruhi pihak yang mendengar atau melihatnya.

Propaganda kadang menyampaikan pesan yang benar, tetapi sering kali menyesatkan di mana umumnya isi propaganda hanya menyampaikan fakta-fakta pilihan yang dapat menghasilkan pengaruh tertentu, atau lebih menghasilkan reaksi emosional daripada reaksi rasional. Tujuannya adalah untuk mengubah pikiran kognitif narasi subjek dalam kelompok sasaran untuk kepentingan tertentu.

Propaganda adalah sebuah upaya disengaja dan sistematis untuk membentuk persepsi, memanipulasi alam pikiran atau kognisi, dan memengaruhi langsung perilaku agar memberikan respon sesuai yang dikehendaki pelaku propaganda.

Sebagai komunikasi satu ke banyak orang (one-to-many), propaganda memisahkan komunikator dari komunikannya. Namun menurut Ellul, komunikator dalam propaganda sebenarnya merupakan wakil dari organisasi yang berusaha melakukan pengontrolan terhadap komunikannya. Sehingga dapat disimpulkan, komunikator dalam propaganda adalah seorang yang ahli dalam teknik penguasaan atau kontrol sosial. Dengan berbagai macam teknis, setiap penguasa negara atau yang bercita-cita menjadi penguasa negara harus mempergunakan propaganda sebagai suatu mekanisme alat kontrol sosial.

b. Jenis-Jenis Propaganda

Menurut Shoelhi (2012), berdasarkan sumber isi pesannya propaganda dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

- 1) Propaganda Tertutup, sumber propaganda ini tertutup sehingga tidak diketahui siapa sumbernya.
- 2) Propaganda Terbuka, sumber propaganda ini disebutkan dengan jelas dan secara terbuka.
- Propaganda Tertunda, sumber propaganda ini pada mulanya dirahasiakan, tetapi lambat laun terbuka dan jelas.

c. Contoh propaganda di Indonesia

- Contoh white propaganda yaitu seperti RRI dan TVRI kedua media ini dari dahulu sampai sekarang masih sering digunakan untuk alat komunikasi pemerintah untuk menyampaikan informasi tentang kebijakan pemerintah kepada rakyat indonesia secara luas.
- 2) Contoh *black* propaganda yang sempat kita dengar yaitu:

- Personel GAM a) kembali memakai sentimen kedaulatan sumber daya alam. Mereka menyebarkan propaganda bahwa gas alam dan kekayaan lain di Tanah Rencong dieksploitasi di depan mata orang-orang asli yang tak kebagian apa-apa serta tetap miskin, sementara para pendatang makin kaya. Propaganda ini terbukti efektif dan perekrutan bisa berjalan baik terutama untuk target laki-laki di pedesaan.
- b) Beredar sebuah video KKB Papua melakukan propaganda untuk membujuk warga agar tak pemerintah Indonesia. mendukung Seperti diketahui, kondisi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua saat ini sudah putus asa karena dikepung Satgas Nemangkawi. Tapi tampaknya aksi keji mereka menebar propaganda di masyarakat masih terus berlanjut. Contohnya seperti dalam video yang beredar baru-baru ini, tampak KKB Papua berusaha mempengaruh warga agar tak mendukung pemerintah Indonesia. Mereka melarang warga untuk mengikuti pemilihan umum bupati di daerah tersebut. "Saya melarang untuk kegiatan politik pemilihan bupati. Atas nama seluruh TNPB saya menyampaikan kepada seluruh masyarakat pribumi di Kabupaten Mimika, saya melarang keras tidak boleh mengikuti kegiatan politik pemerintah Republik Indonesia," kata anggota KKB Papua.
- 3) Contoh *grey* propaganda yang pernah kita liat ditelevisi yaitu propaganda yang dilakukan oleh partai politik yakni partai NASDEM mengatakan bahwasanya MENDAGRI, Gamawan Fauzi harus mundur dari jabatannya, karena beliau tidak mampu menyelesaikan program E-KTP yang akibatnya berujung pada masalah DPT yang masih belum terselesaikan hingga Tapi ini. MENDAGRI membantah dan saat mengatakan bahwa prorgram E-KTP tidak ada hubungannya dengan DPT.
- 4) Contoh *ratio* propagandaa yang sangat hangat diingatan kita, yang pada tanggal 28 oktober yang kita peringati hari sumpah pemuda, sebagai contoh yakni isi sumpah pemuda digunakan untuk mengingatkan dan menyatukan para pemuda di seluruh Indonesia untuk tetap bersatu demi kajayaan bangsa.
- c) Contoh Propaganda Internasional

Lobi internasional oleh kelompok pendukung kemerdekaan Papua dilakukan secara bilateral antamegara maupun di forum regional/intemasional dan dengan LSM. Lobi bilateral dijalankan melalui pendekatan persuasif kepada pemegang simpul pemerintahan di berbagai negara. Upaya bilateral juga dilakukan dengan membuka kantor perwakilan dan konsulat. Hasilnya adalah beberapa negara di Pasifik Selatan secara tegas mendukung perjuangan kelompok promerdeka di Papua.

Namun demikian, haruslah diingat bahwa dukungan dari pemerintahan negara asing terhadap kelompok promerdeka di Papua tidak bersifat konstan, tetapi cenderung fluktuatif bergantung pada siapa pemimpin negara yang sedang berkuasa pada saat tertentu. Lobi secara bilateral kemudian ditindak lanjuti di forum regional dan internasional, seperti di PBB dan Forum Negara Pasifik untuk memperoleh dukungan secara terbuka. Dukungan ini merupakan second voice untuk memudahkan upaya menggalang simpati melalui perwakilan negara asing yang internasional mendukung kemerdekaan Papua. Beberapa isu yang biasanya diangkat dalam forum regional/internasional adalah sejarah politik Papua, keabsahan Pepera, masalah HAM, peran dan dominasi militer Indonesia, ketidakadilan sosial dan ekonomi masyarakat Papua, diskriminasi rasial (ras Melanesia) dan kerusakan lingkungan. Berikut ini adalah posisi negaranegara asing dalam isu Papua:

- 1) Australia
- 2) Negara-Negara Pasifik Selatan

Posisi negara-negara Pasifik Selatan pendukung Papua Merdeka

- (a) Negara Kepulauan Cook (Cook Island)
- (b) Nauru
- (c) Tuvalu
- (d) Vanuatu
- d) Contoh Propaganda di era media sosial

Upaya propaganda dengan tujuan memecah belah opini publik telah menjadi hal mainstream di jagat media sosial dewasa ini. Trik dan teknik yang digunakan dalam upaya propaganda komputasional tersebut pun beragam, mulai dari menaikkan volume informasi yang mengarakterisasi kelompok masyarakat tertentu, hingga membatasi level perhatian dan tingkat kepercayaan pengguna internet.

Di 70 negara yang diteliti, sebanyak 60 di antaranya ditemukan akun-akun palsu yang dioperasikan oleh manusia, termasuk Indonesia, dengan aktivitas propaganda di media sosial yang bergerak dengan cara memperkuat konten dan media daring.

1) Peran manusia

Pakar Telematika Abimanyu Wahyu Hidayat mengatakan upaya penyebaran konten-konten negatif jelas membutuhkan otak manusia karena baik bot ataupun teknologi kecerdasan buatan tidak dapat melakukan hal tersebut secara mandiri. Bot, lanjutnya, tidak memiliki kemampuan menciptakan kata-kata atau kalimat yang dapat mengarahkan pemikiran tertentu. "Penyusunan kata atau kalimat itu dilakukan secara manual oleh seseorang yang kemudian diarahkan.

2) Penggunaan buzzer

Secara terpisah, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Semuel Abrijani Pengerapan mengatakan pada era digital penggunaan buzzer merupakan hal yang lazim dilakukan, meskipun ada aturan yang harus dipatuhi baik itu aturan yang dibuat oleh platform maupun pemerintah. Semuel mengatakan platform tidak akan mentolerir akun-akun palsu yang yang dioperasikan oleh bot.

e) Contoh Propaganda Radikalisme

Kisah 'hijrah' yang dilakukan ratusan Warga Negara Indonesia (WNI) ke Negeri 'Daulah Islamiyah' di Suriah di bawah naungan Khilafah ternyata tidak sebagaimana yang diharapkan seperti yang awalnya dijanjikan kelompok Islamic State of Iraq and Suriah (ISIS) yang sebelumnya tidak diketahui sebagai kelompok radikal terorisme.

5. Pembangunan dan konektivitas di Indonesia



Berbagai upaya yang telah dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan, khususnya dalam keterbatasan penyediaan infrastruktur untuk mendorong aktivitas perekonomian, baik penyediaan barang (manufaktur) maupun jasa (pariwisata).

Berdasarkan data yang diperoleh dari *Global Competitiveness Report*, keterbatasan infrastruktur juga salah satu faktor yang dapat menghambat kemudahan dalam melakukan usaha di Indonesia. Tetapi, di sisi lain pendanaan pemerintah untuk

memenuhi kebutuhan penyediaan infrastruktur juga terbatas.

Pembangunan dan konektivitas di berbagai wilayah di Indonesia antara lain:

a. Sumatera



- 1) Bakauheni Terbanggi Besar 140 Km
- 2) Terbanggi Besar Kayu Agung 189 Km
- 3) Kayu Agung Palembang Betung 38 Km
- 4) Belawan Medan Tanjung Morawa 43 Km
- 5) Medan Binjai 13 Km
- 6) Medan Kualanamu Tebing Tinggi 62 Km
- 7) Palembang Indralaya 22 Km
- 8) Sigli Banda Aceh Seksi 4 14 Km
- 9) Pekanbaru Dumai 132 Km. (H-3)

b. Kalimantan



- 1) Provinsi Kalimantan Tengah
- 2) Provinsi Kalimantan Selatan
- 3) Provinsi Kalimantan Barat

4) Privinsi Kalimantan Timur & Kalimantan Utara

c. Jawa



Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Bina Marga terus meningkatkan kemantapan jalan Pantai Selatan (Pansela) Jawa sepanjang 1.604 km yang membentang dari Provinsi Banten hingga Jawa Timur. Saat ini tengah dilakukan peningkatan kualitas layanan Jalur Pansela Jawa sepanjang 99,6 km yang terdiri dari 9 ruas/seksi yaitu ruas/seksi 1 dan 2 di wilayah Jawa Tengah (Jateng) sepanjang 10,65 Km dan seksi 3, 4, 5 di wilayah D.I Yogyakarta sepanjang 17,32 Km dan seksi 6, 7, 8, 9 di wilayah Jawa Timur (Jatim) sepanjang 71,69 Km.

d. Papua dan Papua Barat



Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berkomitmen mewujudkan pembangunan infrastruktur yang andal di Provinsi Papua dan Papua Barat. Hal ini bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan yang tinggi, mengurangi indeks kemahalan dan pemerataan pembangunan infrastruktur.

6. Kekayaan alam yang tersebar di Indonesia

Kekayaan alam tersebut tersebar di berbagai daerah Indonesia. Berikut wilayah yang punya kekayaan alam melimpah :

a. Riau



Riau merupakan daerah penghasil minyak terbesar di Indonesia. Di mana daerah tersebut mampu menghasilkan 365.827 barrel per hari dengan rincian minyak mentah sebanyak 359.777 barrel dan kondesat sebesar 6.050 barrel.

b. Papua



Ketika berbicara sumber daya alam, maka Papua merupakan salah satu surganya. Berbagai barang tambang bisa ditemukan di sini termasuk tambang emas. Papua merupakan daerah tambang emas terbesar di dunia. Total cadangan emas yang dimiliki sebesar 1.187 ton dengan nilai mencapai USD 469,7 miliar.

c. Tanjung Enim



Tanjung Enim, Sumatera selatan adalah wilayah penghasil batu bara. Produksi tambang batu bara di daerah ini mampu menghasilkan 1.500 -1.700 ton setiap jamnya. Jumlah produksi yang tentunya sangat besar.

d. Pulau Bangka



Penghasil timah terbesar ada di Pulang Bangka, Provinsi Bangka Belitung. Salah satu faktor yang menyebabkan Bangka Belitung mampu menghasilkan timah yang sangat banyak adalah karena pulau tersebut kaya juga akan bebatuan yang memiliki sifat asam. Bangka Belitung mampu menghasilkan timah mencapai 100.000 ton dan jumlah tersebut akan terus bertambah seiring berjalannya waktu.

e. Kalimantan Timur



Kalimantan Timur dikenal sebagai daerah penghasil gas alam terbesar di Indonesia. Salah satu titik yang menyimpan kekayaan gas alam adalah di blok Mahakam.



7. Sinergitas Polri dan TNI sebagai perekat kebhinekaan NKRI

Untuk menjaga, memelihara serta bisa memberikan contoh kepada masyarakat agar selalu menjaga kebhinekaan, Hal ini menunjukan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa kebersamaan, soliditas dan sinergitas sangat dibutuhkan untuk menunjang tugas pokok masing-masing.

Sinergitas TNI dan Polri harus terus dibina, mengingat situasi politik dan ekonomi di wilayah Republik Indonesia yang semakin dinamis, dengan kekompakan kedua institusi ini bisa menciptakan situasi yang kondusif di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sinergitas antar TNI dengan Polri sangat dibutuhkan guna mendukung pelaksanaan tugas sebagai garda terdepan menjaga keamanan dan ketertiban di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada dasarnya, TNI-Polri memang memiliki peranan yang sangat penting dalam mengayomi masyarakat. Kerjasama yang baik sangat diperlukan, antara personil TNI-Polri ini untuk menciptakan suasana yang aman, tertib dan kondusif di tengahtengah masyarakat.

Sikap kritis masyarakat cenderung mudah menyulut terjadinya benturan atau konflik horizontal. Untuk itu, Prajurit TNI dan Polri jangan sampai menjadi bagian dari permasalahan tetapi harus menjadi solusi dan motivator perekat persatuan dan kesatuan bangsa.

Pentingnya persatuan dan kesatuan yang ditunjukkan dalam bentuk kerja sama antara TNI dan Polri dalam rangka penanganan kasus dan berhasil dengan baik adalah ketika penangkapan 1 ton 29 kg narkoba di Selat Philip yang dilaksanakan oleh KRI Siguro-864. "Dengan kerja sama dan koordinasi yang baik antar instansi terkait, semua dapat berjalan dengan baik dan membuahkan hasil yang membanggakan.

Rapatkan barisan dan terus kuatkan soliditas untuk menjaga NKRI dari ancaman masuknya narkoba, masuknya pahampaham yang bertentangan dengan ideologi Pancasila karena tanpa adanya soliditas, sinergitas TNI dan Polri mustahil semuanya bisa berjalan dengan baik.

Pertama, jaga kepercayaan rakyat pada TNI dan Polri jangan sampai dinodai, dirusak atau dihancurkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Salah satu tindakan yang nyata merusak kepercayaan rakyat kepada TNI Polri adalah kegiatan yang melanggar disiplin maupun hukum.

Kedua, tingkatkan kemampuan deteksi dini dan cegah dini dari ancaman Ipoleksosbudhankam yang dapat merusak persatuan, kesatuan dan keutuhan NKRI.

Ketiga, TNI dan Polri sebagai perekat negara harus berdiri tegak di atas semua golongan dan mampu menjadi perekat kemajemukan dalam menjaga kebhinekaan.

Keempat, unsur pimpinan agar selalu dekat dan menyatu dengan anak buahnya, sehingga mengetahui segala kesulitan yang dialami bawahannya dan dengan segera dapat diambil langkah solusinya.

Kelima, tetap jaga dan pelihara soliditas dan solidaritas TNI-Polri, sehingga terjalin hubungan baik antar individu dan satuan sebagai modal dasar melaksanakan peran fungsi dan tugas masing-masing serta sebagai teladan kekompakan bagi stakeholder maupun komponen masyarakat lainnya.



RANGKUMAN

- 1. Keutuhan NKRI, menentukan tercapainya tujuan negara Indonesia yang terdapat dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Keutuhan NKRI, menentukan tercapainya tujuan negara Indonesia yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu: "Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum; dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial".
- Negara Indonesia yang berbentuk negara kepulauan memiliki karakteristik dan ciri khas yang dibingkai dalam azas nusantara yaitu suatu konsep yang memandang wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah, yang terdiri atas wilayah perairan dan di dalamnya terdapat pulau-pulau dan gugusan pulau-pulau. Wawasan Nusantara memandang bahwa perairan/laut adalah sebagai penghubung antar pulau yang satu dengan pulau yang lain menjadi satu kesatuan.

- Otonomi khusus merupakan kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada provinsi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.
- 4. Propaganda adalah sebuah upaya disengaja dan sistematis untuk membentuk persepsi, memanipulasi alam pikiran atau kognisi, dan memengaruhi langsung perilaku agar memberikan respon sesuai yang dikehendaki pelaku propaganda.
- 5. Tiga prinsip konsep konektivitas terkait pembangunan nasional:
 - Memaksimalkan pertumbuhan melalui kesatuan kawasan, bukan keseragaman (inclusive development) dengan menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan.
 - b. Memperluas pertumbuhan melalui konektivitas wilayahwilayah melalui inter-moda supply chain system yang menghubungkan hinterland dan yang tertinggal dengan pusat-pusat pertumbuhan.
 - c. Mencapai pertumbuhan inklusif dengan menghubungkan daerah terpencil dengan infrastruktur dan pelayanan dasar dalam mendapatkan manfaat pembangunan. Dengan demikian, ketersediaan infrastruktur yang dapat menghubungkan antara pusat pertumbuhan dan wilayah sekitarnya sangat diperlukan agar tidak terjadi ketimpangan.
- Indonesia merupakan negara dengan tingkat biodiversitas tertinggi kedua di dunia setelah Brasil. Fakta tersebut menunjukkan tingginya keanekaragaman sumber daya alam hayati yang dimiliki Indonesia
- 7. Sinergitas TNI dan Polri harus terus dibina, mengingat situasi politik dan ekonomi di wilayah Republik Indonesia yang semakin dinamis, dengan kekompakan kedua institusi ini bisa menciptakan situasi yang kondusif di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.



LATIHAN

- 1. Jelaskan konsep keutuhan NKRI dalam kebhinekaan!
- 2. Jelaskan integrasi nasional dalam keutuhan NKRI!
- 3. Jelaskan otonomi khusus di Indonesia!
- 4. Jelaskan ketahanan terhadap proganda kelompok tertentu terhadap keutuhan NKRI!
- 5. Jelaskan pembangunan dan konektivitas di Indonesia!
- 6. Jelaskan kekayaan alam yang tersebar di Indonesia!
- 7. Jelaskan sinergitas Polri dan TNI sebagai perekat kebhinekaan NKRI!